

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

**PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK
INDONESIA**

NOMOR 44 TAHUN 2016

TENTANG

**DAFTAR BIDANG USAHA YANG
TERTUTUP DAN BIDANG USAHA
YANG TERBUKA DENGAN
PERSYARATAN DI BIDANG
PENANAMAN MODAL**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA
ESA**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang:

- a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 12 ayat (4) dan Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal telah ditetapkan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2014 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal;
- b. bahwa untuk lebih meningkatkan kegiatan penanaman modal baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri untuk percepatan pembangunan dengan tetap meningkatkan perlindungan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, serta Koperasi dan berbagai sektor strategis nasional serta meningkatkan daya saing ekonomi dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN dan dinamika globalisasi ekonomi, dipandang perlu mengganti ketentuan mengenai daftar bidang usaha yang tertutup dan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan di bidang penanaman modal;
- c. bahwa sehubungan dengan hal sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal.

**REGULATION OF THE PRESIDENT OF
REPUBLIC OF INDONESIA**

NUMBER 44 OF 2016

ON

**LIST OF BUSINESS FIELDS WHICH ARE
CLOSED TO INVESTMENT AND BUSINESS
FIELDS WHICH ARE CONDITIONALLY
OPEN TO INVESTMENT**

BY THE GRACE OF GOD THE ALMIGHTY

**THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF
INDONESIA**

Considering:

- a. that to implement Article 12 paragraph (4) and Article 13 paragraph (1) of Law Number 25 of 2007 on Investment, Presidential Regulation Number 39 of 2014 on The List of Business Fields which are Closed to Investment and Business Fields which are Conditionally Open to Investment was issued;
- b. that to further increase both domestic and foreign capital investment for the purpose of accelerating development by increasing protection for Micro, Small and Medium-Scale Businesses, Cooperatives and other national strategic sectors and increasing economic competitiveness to face the ASEAN Economic Community and the dynamics of economic globalization, it is viewed as necessary to amend the provisions regarding the list of business fields which are closed to investment and business fields which are conditionally open to investment;
- c. that referring to a. and b. above, it is necessary to issue a Presidential Regulation on Business Fields which are Closed to Investment and Business Fields which are Conditionally Open to Investment;

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

Mengingat:

1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724).

In View Of:

1. Article 4 paragraph (1) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia;
2. Law Number 25 of 2007 on Investment (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2007 Number 67, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 4724);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN PRESIDEN TENTANG
DAFTAR BIDANG USAHA YANG
TERTUTUP DAN BIDANG USAHA YANG
TERBUKA DENGAN PERSYARATAN DI
BIDANG PENANAMAN MODAL.

HAS DECIDED:

To Issue:

PRESIDENTIAL REGULATION ON THE
LIST OF BUSINESS FIELDS WHICH ARE
CLOSED TO INVESTMENT AND
BUSINESS FIELDS WHICH ARE
CONDITIONALLY OPEN TO
INVESTMENT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan:

1. Bidang Usaha adalah segala bentuk kegiatan usaha yang dilakukan untuk memproduksi barang atau jasa pada sektor-sektor ekonomi.
2. Bidang Usaha Yang Terbuka adalah Bidang Usaha yang dilakukan tanpa persyaratan dalam rangka Penanaman Modal.
3. Bidang Usaha Yang Tertutup adalah Bidang Usaha tertentu yang dilarang diusahakan sebagai kegiatan Penanaman Modal.
4. Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan adalah Bidang Usaha tertentu yang dapat diusahakan untuk kegiatan Penanaman Modal dengan

CHAPTER I

GENERAL PROVISIONS

Article 1

In this Presidential Regulation, what is meant by:

1. Business Field is any form of business engaged in to produce goods or services in economic sectors.
2. Open Business Fields are Business Fields which are engaged in without any Investment conditions.
3. Closed Business Fields are certain Business Fields which may not be engaged in as Investment activities.
4. Conditionally Open Business Fields are certain Business Fields in which Investment may be conducted with certain conditions, which are reserved for Micro, Small and

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

persyaratan, yaitu dicadangkan untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah serta Koperasi, Kemitraan, kepemilikan modal, lokasi tertentu, perizinan khusus, dan penanam modal dari negara Association of Southeast Asian Nations (ASEAN).

Medium Enterprises and Cooperatives, Partnerships, capital ownership, certain locations, special permit holders, and investors from the Association of Southeast Asian Nations (ASEAN).

5. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh Penanam Modal dalam negeri maupun Penanam Modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia.
6. Penanam Modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing.
7. Kemitraan adalah kerjasama dalam kegiatan penanaman modal untuk Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dengan usaha besar.
8. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah adalah usaha mikro, kecil, menengah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
9. Koperasi adalah koperasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian

5. Investment means any form of investment activity, whether conducted by domestic or foreign Investors to do business in the territory of the Republic of Indonesia.
6. An investor means an individual or a business entity making an investment, who may be either a domestic investor or a foreign investor.
7. A partnership is a cooperation in investment in Conditionally Open Business Fields either direct or indirect, on the basis of the principle of mutual need, trust, strength, and benefit between Micro, Small and Medium Enterprises and large businesses.
8. Micro, Small and Medium Enterprises are the micro, small, medium scale enterprises referred to in Law Number 20 of 2008 on Micro, Small and Medium Enterprises.
9. A Cooperative is a cooperative referred to in Law Number 25 of 1992 on Cooperatives.

BAB II

BIDANG USAHA

Pasal 2

- (1) Bidang Usaha dalam kegiatan Penanaman Modal terdiri atas:

CHAPTER II

BUSINESS FIELDS

Article 2

- (1) Business Fields in Investment activities comprise:

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

- | | |
|---|--|
| <p>a. Bidang Usaha Yang Terbuka;</p> <p>b. Bidang Usaha Yang Tertutup; dan</p> <p>c. Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan.</p> <p>(2) Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:</p> <p>a. Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan: yang dicadangkan atau kemitraan dengan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah serta Koperasi; dan</p> <p>b. Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan tertentu yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none">1) batasan kepemilikan modal asing;2) lokasi tertentu;3) perizinan khusus;4) modal dalam negeri 100% (seratus persen); dan/atau5) batasan kepemilikan modal dalam kerangka kerjasama Association of Southeast Asian Nations (ASEAN). | <p>a. Open Business Fields;</p> <p>b. Closed Business Fields;</p> <p>c. Conditionally Open Business Fields.</p> <p>(2) The Conditionally Open Business Fields referred to in paragraph (1) c. comprise:</p> <p>a. Conditionally Open Business Fields: those reserved for or which require partnership with a Micro, Small or Medium Scale Enterprise or a Cooperative; and</p> <p>b. Certain Conditionally Open Business Fields ie:</p> <ol style="list-style-type: none">1) those under limitations on foreign capital ownership;2) those in certain locations;3) those requiring special permits;4) those reserved for 100% (one hundred per cent) domestic capital ownership; and/or5) those under limitations on capital ownership in the cooperation framework of the Association of Southeast Asian Nations (ASEAN). |
|---|--|

Pasal 3

Bidang Usaha yang tidak tercantum dalam Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan merupakan Bidang Usaha Yang Terbuka.

Pasal 4

Bidang Usaha Yang Tertutup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Article 3

Business Fields which are not listed as Closed Business Fields or Conditionally Open Business Fields are Open Business Fields.

Article 4

The Closed Business Fields referred to in Article 2 paragraph (1) b. are listed in Annex I which is an inseparable part of this Presidential Regulation.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

Pasal 5

- (1) Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan: yang dicadangkan atau Kemitraan dengan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah serta Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Penanam Modal dengan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah serta Koperasi dengan pola: inti plasma, subkontrak, keagenan, waralaba, dan pola Kemitraan lainnya.

Pasal 6

Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b tercantum dalam Lampiran III dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

BAB III

**PELAKSANAAN PENANAMAN
MODAL PADA BIDANG USAHA**

Pasal 7

- (1) Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) harus memenuhi persyaratan lokasi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang penataan ruang dan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan lingkungan hidup.

Article 5

- (1) The Conditionally Open Business Fields which are reserved or require a Partnership with a Micro, Small or Medium Enterprise or Cooperative referred to in Article 2 paragraph (2) a. are listed in Annex II and which is an inseparable part of this Presidential Regulation.
- (2) The Partnership referred to in paragraph (1) to be formed by Investors with Micro, Small and Medium Enterprises or Cooperatives may take the following forms: plasma nucleus, subcontract, agency, franchise, or another form of Partnership.

Article 6

The Certain Conditionally Open Business Fields referred to in Article 2 paragraph (2) b. re listed in Annex III which is an inseparable part of this Presidential Regulation.

CHAPTER III

**THE IMPLEMENTATION OF
INVESTMENT IN BUSINESS
FIELDS**

Article 7

- (1) The Conditionally Open Business Fields referred to in Article 2 paragraph (2) must meet the location requirements stated in the prevailing spatial planning (zoning) and environmental management regulations.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

- | | |
|---|--|
| <p>(2) Dalam hal izin Penanaman Modal untuk Bidang Usaha, Yang Terbuka Dengan Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah ditetapkan lokasi usahanya dan Penanam Modal bermaksud memperluas usaha dengan melakukan kegiatan usaha yang sama di luar lokasi yang sudah ditetapkan dalam izin Penanaman Modal tersebut, Penanam Modal harus memenuhi persyaratan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).</p> <p>(3) Untuk memenuhi persyaratan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Penanam Modal tidak diwajibkan untuk mendirikan badan usaha baru, kecuali ditentukan lain yang ditetapkan dengan undang-undang.</p> | <p>(2) If for an Investment license for a Conditionally Open Business Fields referred to in paragraph (1), the business location has already been determined and the Investor intends to expand the business by engaging in the same business outside of the location stated in the Investment license, the Investor must comply with the location requirements referred to in paragraph (1).</p> <p>(4) In order to comply with the location requirements referred to in paragraph (2), the Investor is not required to establish a new business entity, unless required to do so by law.</p> |
|---|--|

Pasal 8

Article 8

- | | |
|--|---|
| <p>(1) Dalam hal pelaksanaan kegiatan Penanaman Modal pada Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c dilakukan secara tidak langsung atau portofolio yang transaksinya dilakukan melalui pasar modal dalam negeri, Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c menjadi Bidang Usaha Terbuka.</p> <p>(2) Dalam hal pelaksanaan kegiatan Penanaman Modal pada Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dilakukan di kawasan ekonomi khusus, Bidang Usaha tersebut menjadi Bidang Usaha Terbuka kecuali Bidang Usaha yang dicadangkan untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah serta Koperasi</p> | <p>(1) If the Investment in a Conditionally Open Business Fields referred to in Article 2 paragraph (1) c. is made indirectly or is a portfolio transaction conducted in the domestic capital market, the Conditionally Open Business Field referred to in Article 2 paragraph (1) c. will become an Open Business Field.</p> <p>(2) If the Investment in a Conditionally Open Business Field as referred to in Article 2 paragraph (2) is made in a special economic zone, the relevant Business Field will become an Open Business Field, unless it is a Business Fields reserved for Micro, Small and Medium Enterprises and Cooperatives.</p> |
|--|---|

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

Pasal 9

Dalam hal terjadi perubahan kepemilikan modal akibat penggabungan, pengambilalihan, atau peleburan dalam perusahaan Penanaman Modal yang bergerak di Bidang Usaha yang sama, berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. batasan kepemilikan modal Penanam Modal asing dalam perusahaan Penanaman Modal yang menerima penggabungan adalah sebagaimana yang tercantum dalam izin Penanaman Modal dan/atau izin usaha perusahaan tersebut;
- b. batasan kepemilikan modal Penanam Modal asing dalam perusahaan Penanaman Modal yang diambil alih adalah sebagaimana tercantum dalam izin Penanaman Modal dan/atau izin usaha perusahaan tersebut; dan/atau
- c. batasan kepemilikan modal Penanam Modal asing dalam perusahaan baru hasil peleburan adalah sebagaimana ketentuan yang berlaku pada saat terbentuknya perusahaan baru hasil peleburan dimaksud.

Pasal 10

- 1) Dalam hal Penanaman Modal asing melakukan perluasan kegiatan usaha dalam Bidang Usaha yang sama dan perluasan kegiatan usaha tersebut membutuhkan penambahan modal melalui penerbitan saham dengan hak memesan efek terlebih dahulu (rights issue) dan Penanam Modal dalam negeri tidak dapat berpartisipasi dalam penambahan modal tersebut, maka berlaku ketentuan mengenai hak mendahului bagi Penanam Modal asing, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perseroan terbatas.

Article 9

In the event of a change to the capital ownership resulting from a merger, acquisition or consolidation of Investment companies engaged in the same Business Field, the following provisions apply:

- a. the limit on capital owned by foreign Investors in the Investment company which survives the merger will be as stated in the Investment license and/or the business license of that company;
- b. the limit on capital owned by foreign Investors in an acquired company will be stated in the Investment license and/or the business license of that company; and/or
- c. the limit on capital owned by foreign Investors in a new company resulting from a consolidation will be according to the prevailing laws and regulations at the time of the establishment of the new company resulting from a consolidation.

Article 10

- 1) If the foreign Investment Company expands its business in the same Business Field and the business expansion requires an increase in capital through a rights issue and the domestic Investors are unable to participate in the capital increase, the provisions on the preferential right of the foreign Investors to subscribe to new shares will apply, in accordance with the prevailing regulations on limited liability companies.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

(2) Dalam hal penambahan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan jumlah kepemilikan modal asing melebihi batasan maksimum yang tercantum dalam izin Penanaman Modal dan/atau izin usaha, maka dalam jangka waktu 2 (dua) tahun, kelebihan jumlah kepemilikan modal asing tersebut harus disesuaikan dengan batas maksimum yang tercantum dalam izin penanaman modal dan/atau izin usaha, melalui cara:

- a. Penanam Modal asing menjual kelebihan saham yang dimilikinya kepada Penanam Modal dalam negeri;
- b. Penanam Modal asing menjual kelebihan sahamnya melalui penawaran umum yang dilakukan oleh perusahaan yang sahamnya dimiliki oleh Penanam Modal asing tersebut pada pasar modal dalam negeri; atau
- c. perusahaan sebagaimana dimaksud pada huruf b membeli kelebihan jumlah saham yang dimiliki Penanam Modal asing tersebut dan diperlakukan sebagai treasury stocks, dengan memperhatikan ketentuan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Pasal 11

Pelaksanaan kegiatan Penanaman Modal terhadap Bidang Usaha yang diatur dalam Peraturan Presiden ini tidak mengurangi kewajiban Penanam Modal untuk mematuhi ketentuan dan syarat teknis untuk melakukan kegiatan usaha yang ditetapkan oleh:

- a. kementerian/lembaga yang secara teknis berwenang di bidang usaha Penanaman Modal; dan/atau
- b. pemerintah daerah.

2) If the increase in capital referred to in paragraph (1) above results in the foreign capital exceeding the maximum amount stated in the Investment license and/or business license, within 2 (two) years, the excess amount of foreign capital must be adjusted to the limit stated in the investment license and/or business license, through the following:

- a. the foreign Investors selling the excess shares they own to the local Investors;
- b. the foreign Investors selling the excess shares through a public offering conducted by the company whose shares are owned by the foreign Investors in the local capital market; or
- c. the companies referred to in b. purchasing the excess shares owned by the foreign Investors and the shares will be treated as treasury stocks, taking into account Article 37 of Law Number 40 of 2007 on Limited Liability Companies.

Article 11

Investment in the Business Fields under this Presidential Regulation remain subject to the obligation Investors have to comply with the technical terms and conditions which apply to the business activities issued by:

- a. the ministry/technical institution which has authority over the Investment business field; and/or
- b. the regional government.

BAB IV

PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PENYELESAIAN PERMASALAHAN DALAM PENANAMAN MODAL

Pasal 12

- (1) Menteri yang menyelenggarakan urusan koordinasi Pemerintahan di bidang perekonomian melakukan pemantauan, evaluasi, dan penyelesaian permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan Penanaman Modal pada Bidang Usaha yang diatur dalam Peraturan Presiden.
- (2) Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyelesaian permasalahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh Tim Nasional Peningkatan Ekspor dan Peningkatan Investasi yang telah dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Presiden tersendiri.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

Ketentuan pelaksanaan kegiatan Penanaman Modal terhadap Bidang Usaha yang diatur dalam Peraturan Presiden ini tidak berlaku bagi Penanaman Modal yang telah disetujui pada bidang usaha tertentu sebelum Peraturan Presiden ini diundangkan, sebagaimana yang tercantum dalam izin Penanaman Modal dan/atau izin usaha perusahaan, kecuali ketentuan tersebut lebih menguntungkan bagi Penanaman Modal dimaksud.

CHAPTER IV

INVESTMENT MONITORING, EVALUATION AND DISPUTE RESOLUTION

Article 12

- (1) The Ministers responsible for Government coordination in the economic field will monitor, evaluate and resolve disputes regarding Investment in the Business Fields listed in the Presidential Regulation.
- (2) The National Team for Increasing Exports and Investment formed and established under a separate Presidential Decree will assist the monitoring, evaluation and dispute resolution referred to in paragraph (1).

CHAPTER V

TRANSITIONAL PROVISIONS

Article 13

The provisions on Investment in the Business Fields listed in this Presidential Regulation do not apply to Investments in a particular sector approved before the promulgation of this Presidential Regulation, referred to in the Investment license and/or the company's business license, unless the provisions are of greater benefit to that Investment.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Semua peraturan pelaksanaan dari Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2014 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Presiden ini, tetap berlaku sampai dengan dikeluarkannya peraturan pelaksanaan berdasarkan Peraturan Presiden ini.

Pasal 15

Dengan berlakunya Peraturan Presiden ini, Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2014 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 93) dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Article 16

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

CHAPTER VI
CLOSING PROVISIONS

Article 14

All implementing regulations of Presidential Regulation Number 39 of 2014 regarding The List of Business Fields which are Closed to Investment and Business Fields which are Conditionally Open to Investment, to the extent they are not inconsistent with this Presidential Regulation, remain in force until implementing regulations are issued based on this Presidential Regulation.

Article 15

With the coming into force of this Presidential Regulation, Presidential Regulation Number 39 of 2014 on The List of Business Fields which are Closed to Investment and Business Fields which are Conditionally Open to Investment is revoked and declared no longer applicable.

Article 16

This Regulation comes into force on the date of its promulgation.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

Agar setiap orang mengetahuinya,
memerintahkan pengundangan Peraturan
Presiden ini dengan penempatannya dalam
Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
Pada Tanggal 12 Mei 2016

Presiden Republik Indonesia

Ttd

JOKO WIDODO

For public cognizance, the publication of this
Presidential Regulation is ordered by
placing it in the State Gazette of the
Republic of Indonesia.

Issued in Jakarta
on 12 May 2016

The President of the Republic of Indonesia,

Signed

JOKO WIDODO

Diundangkan Di Jakarta,
Pada Tanggal 18 Mei 2016
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI
MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

YASONNA H. LAOLY

Promulgated in Jakarta
on 18 May 2016
THE MINISTER OF LAW AND HUMAN
RIGHTS OF THE
REPUBLIC OF INDONESIA,

Signed

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK
INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 97

STATE GAZETTE OF THE REPUBLIC OF
INDONESIA OF 2016 NUMBER 97

Salinan sesuai dengan aslinya.

SEKRETARIAT KABINET RI

Deputi Bidang Perekonomian,

Ttd.

Agistina Murbaningsih

A copy the same as the original

CABINET SECRETARIAT OF THE REPUBLIC
OF INDONESIA

Deputy for the Economic Sector

Signed

Agustina Murbaningsih

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

DAFTAR LAMPIRAN

LIST OF ANNEXES

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

REGULATION OF THE PRESIDENT
OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

NOMOR 44 TAHUN 2016

NUMBER 44 OF 2016

TENTANG

REGARDING

DAFTAR BIDANG USAHA YANG TERTUTUP DAN
BIDANG USAHA YANG TERBUKA DENGAN
PERSYARATAN DI BIDANG PENANAMAN MODAL

THE LIST OF BUSINESS FIELDS WHICH ARE
CLOSED TO INVESTMENT AND BUSINESS FIELDS
WHICH ARE CONDITIONALLY OPEN TO
INVESTMENT

NO.	LAMPIRAN ANNEX	JUDUL TITLE	HALAMAN PAGE
1.	LAMPIRAN I ANNEX I	Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup untuk Penanaman modal <i>List of Business Fields which are Closed to Investment</i>	1
2.	LAMPIRAN II ANNEX II	Daftar Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan: yang dicadangkan atau kemitraan dengan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah serta Koperasi <i>List of Business Fields which are Conditionally Open: these which are reserved for partnerships with Micro, Small, Medium-scale Enterprises and Cooperatives</i>	1
3.	LAMPIRAN III ANNEX III	Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan tertentu: <i>Conditionally Open Business Fields:</i> 1. Sektor Pertanian / <i>Agriculture Sector</i> 2. Sektor Kehutanan / <i>Forestry Sector</i> 3. Sektor Kelautan dan Perikanan / <i>Marine and Fisheries Sector</i> 4. Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral / <i>Energy and Mineral Resources Sector</i> 5. Sektor Perindustrian / <i>Industry Sector</i> 6. Sektor Pertahanan dan Keamanan / <i>Defense and Security Sector</i> 7. Sektor Pekerjaan Umum / <i>Public Works Sector</i> 8. Sektor Perdagangan / <i>Trade Sector</i> 9. Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif / <i>Tourism and Creative Economy Sector</i> 10. Sektor Perhubungan / <i>Interconnection Sector</i> 11. Sektor Komunikasi dan Informatika / <i>Communication and Informatics Sector</i> 12. Sektor Keuangan / <i>Finance Sector</i> 13. Sektor Perbankan / <i>Banking Sector</i> 14. Sektor Tenaga Kerja / <i>Manpower Sector</i> 15. Sektor Pendidikan / <i>Education Sector</i> 16. Sektor Kesehatan / <i>Health Sector</i>	 1 11 13 14 17 19 20 21 25 28 32 34 36 37 38 39

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

LAMPIRAN I

ANNEX I

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

REGULATION OF THE PRESIDENT
OF REPUBLIC OF INDONESIA

NOMOR 44 TAHUN 2016

NUMBER 44 OF 2016

TENTANG

REGARDING

DAFTAR BIDANG USAHA YANG TERTUTUP DAN
BIDANG USAHA YANG TERBUKA DENGAN
PERSYARATAN DI BIDANG PENANAMAN MODAL

LIST OF BUSINESS FIELDS WHICH ARE CLOSED
TO INVESTMENT AND BUSINESS FIELDS WHICH
ARE CONDITIONALLY OPEN TO INVESTMENT

DAFTAR BIDANG USAHA YANG TERTUTUP

LIST OF CLOSED BUSINESS FIELDS

NO.	BIDANG USAHA BUSINESS FIELD	KBLI	SEKTOR SECTOR
1.	Budidaya Ganja / <i>The Cultivation of Marijuana</i>	01289	Pertanian / <i>Agriculture</i>
2.	Penangkapan Spesies Ikan yang Tercantum dalam Appendix / <i>Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES) / The Capture of Fish Species listed in Appendix I of CITES.</i>	10719	Kehutanan / <i>Forestry</i>
3.	Pengangkatan Benda Berharga Asal Muatan Kapal yang Tenggelam / <i>The Lifting of Valuable Objects from Sunken Cargo.</i>	52229	Kelautan dan Perikanan / <i>Marine and Fisheries</i>
4.	Pemanfaatan (Pengambilan) Koral / Karang dari Alam untuk: Bahan Bangunan / Kapur / Kalsium, Akuarium dan Souvenir / Perhiasan, Serta Koral Hidup atau Koral Mati (<i>recent death coral</i>) dari alam. / <i>The Utilization (Collection) of Coral / Reef from Nature For: Building Materials/Lime/Calcium, Aquariums, or Souvenirs / Jewellery, including Living Coral or Recently Dead Coral from the Nature</i>	03117	Kelautan dan Perikanan / <i>Marine and Fisheries</i>
5.	Industri Pembuat Chlor Alkali dengan Proses Merkuri / <i>The of Alkaline Chlorine Production Industry using a Mercury Process.</i>	20111	Perindustrian / <i>Industry</i>
6.	Industri Bahan Aktif Pestisida: / <i>The Industry of Pesticide Active Material: Dichloro Diphenyl Trichloroethane (DDT), Aldrin, Endrin, Dieldrin, Chlordane, Heptachlor, Mirex, dan Toxaphene.</i>	20211	Perindustrian / <i>Industry</i>
7.	Industri Bahan Kimia Industri dan Industri Bahan Perusak Lapisan Ozone (BPO) : / <i>The Industrial Chemical Materials and Materials Harmful to the Ozone Layer (BPO) Industries: Polychlorinated Biphenyl (PCB), Hexachlorobenzene, and Carbon Tetrachloride (CTC), Methyl Chloroform, Methyl Bromide, Trichloro Fluoro Methane (CFC-11), Dichloro Trifluoro Ethane (CFC-12), Trichloro Trifluoro Ethane (CFC-113), Dichloro Tetra Fluoro Ethane (CFC-114), Chloro Pentafluoro Ethane (CFC-115); Chloro Trifluoro Methane (CFC-13), Tetrachloro Difluoro Ethane (CFC-112), Pentachloro Fluoro Ethane (CFC-111), Chloro Heptafluoro Propane (CFC-217), Dichloro Hexafluoro Propane (CFC-216), Trichloro Propane (CFC-213), Hexachloro Difluoro Propane (CFC-211), Bromo Chloro Difluoro Methane (Halon-1211), Bromo Trifluoro</i>	20119	Perindustrian / <i>Industry</i>

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

NO.	BIDANG USAHA <i>BUSINESS FIELD</i>	KBLI	SEKTOR <i>SECTOR</i>
	<i>Methane (Halon-1301), Dibromo Tetrafluoro Ethane (Halon-2402), R-500, R-502.</i>		
8.	Industri Bahan Kimia Daftar-1 Konvensi Senjata Kimia sebagaimana Tertuang Dalam Lampiran I Undang-undang Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Penggunaan Bahan Kimia sebagai Senjata Kimia / <i>The production of List-1 of the Chemical Materials for Chemical Weapons Convention listed in Attachment I to Law Number 9 of 2008 Regarding The Use of Chemical Materials as Chemical Weapons.</i>	20119	Perindustrian / <i>Industry</i>
9.	Industri Minuman Keras Mengandung Alkohol / <i>The Alcoholic Liquor Industry</i>	11010	Perindustrian / <i>Industry</i>
10.	Industri Minuman Mengandung Alkohol : Anggur / <i>The of Alcoholic Beverages Industry: Wine</i>	11020	Perindustrian / <i>Industry</i>
11.	Industri Minuman Mengandung Malt / <i>The Beverages Containing Malt Industry</i>	11031	Perindustrian / <i>Industry</i>
12.	Penyelenggaraan dan Pengoperasian Terminal Penumpang Angkutan Darat / <i>The Implementation and Operation of Ground Transportation Passenger Terminals.</i>	52211	Perhubungan / <i>Interconnection</i>
13.	Penyelenggaraan dan Pengoperasian Penimbangan Kendaraan Bermotor / <i>The Implementation and Operation of Motorized Vehicle Weighing.</i>	52219	Perhubungan / <i>Interconnection</i>
14.	Telekomunikasi / Sarana Bantu Navigasi Pelayaran dan Vessel Traffic Information System (VTIS) / <i>Telecommunications / Vessel Navigational Aids and VTIS</i>	52221	Perhubungan / <i>Interconnection</i>
15.	Penyelenggaraan Pelayanan Navigasi Penerbangan / <i>The Provision of Aviation Navigation Services</i>	52230	Perhubungan / <i>Interconnection</i>
16.	Penyelenggaraan Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor / <i>The Assessment of Motorized Vehicle Types</i>	71203	Perhubungan / <i>Interconnection</i>
17.	Manajemen dan Penyelenggaraan Stasiun Monitoring Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit / <i>The Management and Operation of Radio Frequency Spectrum and Satellite Orbit Monitoring Stations.</i>	61300	Komunikasi dan Informatika / <i>Communication and Informatics</i>
18.	Museum Pemerintah / <i>Government Museums</i>	91021	Pendidikan dan Kebudayaan / <i>Education and Culture</i>
19.	Peninggalan Sejarah dan Purbakala (candi, keratin, prasasti, petilasan, bangunan kuno, dsb) / <i>The preservation of Historical and Ancient Heritage (temples, palaces, inscriptions, hermitages, ancient scaffoldings, etc.)</i>	91023	Pendidikan dan Kebudayaan / <i>Education and Culture</i>
20.	Perjudian / Kasino / <i>Gambling / Casinos</i>	92000	Pariwisata dan Ekonomi Kreatif / <i>Tourism and the Creative Economy</i>

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

Catatan:

1. Bidang Usaha yang Tertutup dapat dimanfaatkan untuk tujuan-tujuan nonkomersial seperti: penelitian dan pengembangan, dan mendapat persetujuan dari instansi yang bertanggungjawab atas pembinaan bidang usaha tersebut.
2. Dalam hal Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) meliputi lebih dari satu bidang usaha, maka ketentuan sebagaimana termaksud dalam Lampiran I hanya berlaku bagi bidang usaha yang tercantum dalam kolom bidang usaha tersebut.

Note:

1. *Closed Business Fields may be engaged in for non-commercial purposes such as: research and development, and require approval from the institution responsible for the development of the related business sector.*
2. *If the Indonesian Business Field Standard Classification (KBLI) contains more than one business sector, the provision of Annex I only apply to the business fields listed in the relevant business field column.*

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
The PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

Ttd./ *signed*

Joko Widodo

Salinan Sesuai dengan aslinya
A copy the same as the original

SEKRETARIAT KABINET RI
CABINET SECRETARIAT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
Deputi Bidang Perekonomian
Deputy for the Economic Sector

Ttd / *signed*

Agustina Murbaningsih

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

LAMPIRAN II

ANNEX II

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

REGULATION OF THE PRESIDENT
OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

NOMOR 44 TAHUN 2016

NUMBER 44 OF 2016

TENTANG

REGARDING

DAFTAR BIDANG USAHA YANG TERTUTUP DAN
BIDANG USAHA YANG TERBUKA DENGAN
PERSYARATAN DI BIDANG PENANAMAN MODAL

LIST OF BUSINESS FIELDS WHICH ARE CLOSED
TO INVESTMENT AND BUSINESS FIELDS WHICH
ARE CONDITIONALLY OPEN TO INVESTMENT

DAFTAR BIDANG USAHA YANG TERBUKA DENGAN PERSYARATAN: YANG DICADANGKAN
ATAU KEMITRAAN DENGAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH SERTA KOPERASI

LIST OF CONDITIONALLY OPEN BUSINESS FIELDS: RESERVED OR PARTNERSHIPS WITH
MICRO, SMALL AND MEDIUM-SCALE BUSINESS AND COOPERATIVES

NO.	Bidang Usaha <i>Business Field</i>	KBLI	Persyaratan <i>Requirements</i>		Sektor <i>Sector</i>
			Dicadangkan untuk <i>Reserved for</i> UMKM	Kemitraan <i>Partnership</i>	
	Usaha budidaya tanaman pangan pokok dengan luas kurang dari 25 Ha: <i>Primary food crop cultivation business with an area of less than 25 Ha:</i>				
1.	Padi / <i>Rice Plants</i>	01121 01122	√	-	Pertanian / <i>Agriculture</i>
2.	Jagung / <i>Corn</i>	01111	√	-	Pertanian / <i>Agriculture</i>
3.	Kedelai / <i>Soybeans</i>	01113	√	-	Pertanian / <i>Agriculture</i>
4.	Kacang Tanah / <i>Peanuts</i>	01114	√	-	Pertanian / <i>Agriculture</i>
5.	Kacang Hijau / <i>Green beans</i>	01115	√	-	Pertanian / <i>Agriculture</i>
6.	Tanaman pangan lainnya (ubi kayu dan ubi jalar) / <i>Other food crops (cassava and sweet potato)</i>	01135	√	-	Pertanian / <i>Agriculture</i>
	Usaha perbenihan perkebunan dengan luas kurang dari 25 Ha <i>Seeding plantation Business with an area of less than 25 Ha:</i>				
7.	Tanaman Jarak Pagar / <i>Jatropha Curcas plants</i>	01299	√	-	Pertanian / <i>Agriculture</i>
8.	Tanaman Pemanis Lainnya / <i>Other sweetener plants</i>	01137	√	-	Pertanian / <i>Agriculture</i>

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

NO.	Bidang Usaha <i>Business Field</i>	KBLI	Persyaratan <i>Requirements</i>		Sektor <i>Sector</i>
			Dicadangkan untuk <i>Reserved for</i> UMKM	Kemitraan <i>Partnership</i>	
9.	Tanaman Tebu / <i>Sugarcane plants</i>	01140	√	-	Pertanian / <i>Agriculture</i>
10.	Tanaman Tembakau / <i>Tobacco plants</i>	01150	√	-	Pertanian / <i>Agriculture</i>
11.	Tanaman Bahan Baku Tekstil dan Tanaman Kapas / <i>Raw textile material and cotton plants</i>	01160	√	-	Pertanian / <i>Agriculture</i>
12.	Tanaman Lainnya yang Tidak Diklasifikasikan di Tempat Lain / <i>Other plants which are not classified elsewhere</i>	01299	√	-	Pertanian / <i>Agriculture</i>
13.	Tanaman Jambu Mete / <i>Cashew plants</i>	01220	√	-	Pertanian / <i>Agriculture</i>
14.	Tanaman Kelapa / <i>Coconut plants</i>	01261	√	-	Pertanian / <i>Agriculture</i>
15.	Tanaman Kelapa Sawit / <i>Palm plants</i>	01262	√	-	Pertanian / <i>Agriculture</i>
16.	Tanaman Untuk Bahan Minuman (Teh, Kopi dan Kakao) / <i>Plants for beverage materials (Tea, Coffee, Cocoa)</i>	01270	√	-	Pertanian / <i>Agriculture</i>
17.	Tanaman Lada / <i>Pepper plants</i>	01281	√	-	Pertanian / <i>Agriculture</i>
18.	Tanaman Cengkeh / <i>Clove plants</i>	01282	√	-	Pertanian / <i>Agriculture</i>
19.	Tanaman Minyak Atsiri / <i>Essential oil plants</i>	01284	√	-	Pertanian / <i>Agriculture</i>
20.	Tanaman obat / Bahan Farmasi (di luar hortikultura) / <i>Medicine/pharmaceutical material plants (excluding horticulture)</i>	01285 01286	√	-	Pertanian / <i>Agriculture</i>
21.	Tanaman Rempah Lainnya / <i>Other Spice Plants</i>	01289	√	-	Pertanian / <i>Agriculture</i>
22.	Tanaman Karet dan Penghasil Getah Lainnya / <i>Rubber and other latex producing plants</i>	01291	√	-	Pertanian / <i>Agriculture</i>
Usaha Perkebunan dengan luas kurang dari 25 Ha: <i>Plantation business with an area of less than 25 Ha:</i>					
23.	Perkebunan Pemanis Lainnya / <i>Other Sweetener Plantations</i>	01137	√	-	Pertanian / <i>Agriculture</i>
24.	Perkebunan Tebu / <i>Sugarcane Plantations</i>	01140	√	-	Pertanian / <i>Agriculture</i>

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

NO.	Bidang Usaha <i>Business Field</i>	KBLI	Persyaratan <i>Requirements</i>		Sektor <i>Sector</i>
			Dicadangkan untuk <i>Reserved for</i> UMKM	Kemitraan <i>Partnership</i>	
25.	Perkebunan Tembakau / <i>Tobacco Plantations</i>	01150	√	-	Pertanian / <i>Agriculture</i>
26.	Perkebunan Bahan Baku Tekstil dan Tanaman Kapas / <i>Raw Textile Material and Cotton Plantations</i>	01160	√	-	Pertanian / <i>Agriculture</i>
27.	Perkebunan Jambu Mete / <i>Cashew plantations</i>	01220	√	-	Pertanian / <i>Agriculture</i>
28.	Perkebunan Kelapa / <i>Coconut plantations</i>	01261	√	-	Pertanian / <i>Agriculture</i>
29.	Perkebunan Kelapa Sawit / <i>Palm plantations</i>	01262	√	-	Pertanian / <i>Agriculture</i>
30.	Perkebunan Untuk Bahan Minuman (The, Kopi dan Kakao) / <i>Plantations for Beverage Materials (Tea, Coffee, Cocoa)</i>	01262	√	-	Pertanian / <i>Agriculture</i>
31.	Perkebunan Lada / <i>Pepper Plantations</i>	01281	√	-	Pertanian / <i>Agriculture</i>
32.	Perkebunan Cengkeh / <i>Clove Plantations</i>	01282	√	-	Pertanian / <i>Agriculture</i>
33.	Perkebunan Minyak Atsiri / <i>Essential Oil Plantations</i>	01284	√	-	Pertanian / <i>Agriculture</i>
34.	Perkebunan Obat / Bahan Farmasi (di luar hortikultura) / <i>Medicine/pharmaceutical material plantations (excluding horticulture)</i>	01285 01286	√	-	Pertanian / <i>Agriculture</i>
35.	Perkebunan Rempah Lainnya / <i>Other Spices Plantations</i>	01289	√	-	Pertanian / <i>Agriculture</i>
36.	Perkebunan Karet dan Penghasil Getah Lainnya / <i>Rubber and other latex producing plantations</i>	01291	√	-	Pertanian / <i>Agriculture</i>
37.	Perkebunan Lainnya / <i>Other plantations</i>	01299	√	-	Pertanian / <i>Agriculture</i>
Usaha dengan kapasitas tertentu <i>Businesses with a certain capacity:</i>					
38.	Industri Bunga Cengkeh Kering / <i>Dried clove flower industries</i>	01630	√	-	Pertanian / <i>Agriculture</i>
39.	Industri Minyak Mentah (minyak makan) dari Nabati dan Hewani / <i>Crude oil from vegetables and animals industries</i>	10490	√	-	Pertanian / <i>Agriculture</i>
40.	Industri Kopra, Serat (fiber), Arang Tempurung, Debu (dust), Nata de Coco / <i>Copra, Coconut Charcoal, Dust, Nata De Coco Industries</i>	10421	√	-	Pertanian / <i>Agriculture</i>

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

NO.	Bidang Usaha <i>Business Field</i>	KBLI	Persyaratan <i>Requirements</i>		Sektor <i>Sector</i>
			Dicadangkan untuk <i>Reserved for</i> UMKM	Kemitraan <i>Partnership</i>	
41.	Industri Minyak Kelapa / <i>Coconut Oil Industries</i>	10422	√	-	Pertanian / <i>Agriculture</i>
42.	Industri Minyak Kelapa Sawit / <i>Palm oil industries</i>	10431	√	-	Pertanian / <i>Agriculture</i>
43.	Industry Serat Kapas / <i>Cotton Fiber Industries</i>	01630	√	-	Pertanian / <i>Agriculture</i>
44.	Industri Biji Kapas / <i>Cotton Seed Industries</i>	01630	√	-	Pertanian / <i>Agriculture</i>
45.	Industri Pengupasan, Pembersihan, Pengeringan, dan Sortasi Hasil Perkebunan (Kakao dan Kopi) / <i>plantation crop Peeling, cleaning, drying, and sorting industries (cocoa and coffee)</i>	10399	√	-	Pertanian / <i>Agriculture</i>
46.	Industri Jambu Mete Menjadi Biji Mete Kering dan Cashew Nut Shell Liquid (CNSL) / <i>Dried Cashew and CNSL industries</i>	10614	√	-	Pertanian / <i>Agriculture</i>
47.	Industri Lada Menjadi Biji Lada Putih Kering dan Biji Lada Hitam Kering / <i>Dried white and black pepper industries</i>	10641	√	-	Pertanian / <i>Agriculture</i>
48.	Industri Gula Pasir, Pucuk Tebu, dan Bagas / <i>Sugar, sugarcane, and sugar cane residue industries</i>	10721	√	-	Pertanian / <i>Agriculture</i>
49.	Industri Teh Hitam / Teh Hijau / <i>Black/green Tea industries</i>	10763	√	-	Pertanian / <i>Agriculture</i>
50.	Industri Daun Tembakau Kering / <i>Dried tobacco leaf industries</i>	12091	√	-	Pertanian / <i>Agriculture</i>
51.	Industri Karet Menjadi Sheet, Lateks Pekat / <i>Rubber into Sheet Industries, Thick Latex</i>	22122	√	-	Pertanian / <i>Agriculture</i>
52.	Industri Minyak Jarak Kasar / <i>Coarse Jatropha Curcas Oil Industries</i>	20294	√	-	Pertanian / <i>Agriculture</i>
53.	Pembibitan dan Budidaya Babi dengan Jumlah Kurang Atau Sama Dengan 125 Ekor / <i>Breeding and raising less than or equivalent to 125 swine</i>	01450	√	-	Pertanian / <i>Agriculture</i>
54.	Pembibitan dan Budidaya Ayam Buras Serta Persilangannya / <i>Breeding and raising native poultry and cross-breeding</i>	01463	√	-	Pertanian / <i>Agriculture</i>

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

NO.	Bidang Usaha <i>Business Field</i>	KBLI	Persyaratan <i>Requirements</i>		Sektor <i>Sector</i>
			Dicadangkan untuk <i>Reserved for</i> UMKM	Kemitraan <i>Partnership</i>	
55.	Pengusahaan Hutan Tanaman Lainnya (antara lain: Aren, Kemiri, Biji Asam, Bahan Baku Arang, Kayu Manis) / <i>Other Forest Plantations (Among Others: Sugar, Pecans, Tamarind Seeds, Raw Material Charcoal, Cinnamon)</i>	02119	√	-	Kehutanan / <i>Forestry</i>
56.	Industri Primer Pengolahan Hasil Hutan: Getah Pinus / <i>Primary Forest Product Processing Industries: Pine Sap</i>	02303	√	-	Kehutanan / <i>Forestry</i>
57.	Industri Primer Pengolahan Hasil Hutan: Bambu / <i>Primary Forest Product Processing Industries: Bamboo</i>	02308	√	-	Kehutanan / <i>Forestry</i>
58.	Pengusahaan Sarang Burung Walet di Alam / <i>swallow nests found in nature Production Businesses</i>	01469	√	-	Kehutanan / <i>Forestry</i>
59.	Industri Kayu Gergajian (kapasitas produksi sampai dengan 2000m ² /tahun) / <i>Sawmill industries (production capacity up to 2000m²/annum)</i>	16101	√	-	Kehutanan / <i>Forestry</i>
60.	Industri Primer Pengolahan Rotan / <i>Primary Rattan Processing Industries</i>	16104	√	-	Kehutanan / <i>Forestry</i>
61.	Pengusahaan Hutan : Rotan / <i>Forest Cultivation Business: Rattan</i>	02131	-	√	Kehutanan / <i>Forestry</i>
62.	Pengusahaan Hutan: Getah Pinus / <i>Forest Cultivation Business: Pine Sap</i>	02132	-	√	Kehutanan / <i>Forestry</i>
63.	Pengusahaan Hutan: Bambu / <i>Forest Cultivation: Bamboo</i>	02134	-	√	Kehutanan / <i>Forestry</i>
64.	Pengusahaan Hutan: Damar/ <i>Forest Cultivation Business: Resin</i>	02135	-	√	Kehutanan / <i>Forestry</i>
65.	Pengusahaan Hutan: Gaharu / <i>Forest Cultivation Business: Eaglewood</i>	02136	-	√	Kehutanan / <i>Forestry</i>
66.	Pengusahaan Shellak, Tanaman Pangan Alternatif (sagu), Getah-getahan, dan Perlebahan / <i>Cultivation of Shellac, alternative crop plants (sago), latex, and beekeeping Businesses</i>	02139	-	√	Kehutanan / <i>Forestry</i>
67.	Pengusahaan Kokon/Kepompong Ulat Sutra (persutran alam) / <i>Cultivation of Silk worm Cocoon/Chrysalis (natural silk) Businesses</i>	01492	-	√	Kehutanan / <i>Forestry</i>
68.	Pembenihan Ikan Laut / <i>Sea Water Fish Hatcheries</i>	03212	-	√	Kelautan dan Perikanan / <i>Maritime and fishery</i>
69.	Pembenihan Ikan Payau / <i>Brackish water fish hatcheries</i>	03525	-	√	Kelautan dan Perikanan / <i>Maritime and fishery</i>
70.	Pembenihan Ikan Air Tawar / <i>Freshwater fish hatcheries</i>	03226	-	√	Kelautan dan Perikanan / <i>Maritime and fishery</i>
71.	Pembesaran Ikan Air Laut / <i>Rearing Sea Water fish</i>	03211	-	√	Kelautan dan Perikanan / <i>Maritime and fishery</i>

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

NO.	Bidang Usaha <i>Business Field</i>	KBLI	Persyaratan <i>Requirements</i>	Kemitraan <i>Partnership</i>	Sektor <i>Sector</i>
			Dicadangkan untuk <i>Reserved for</i> UMKM		
72.	Pembesaran ikan Air Payau / <i>Rearing Brackish water fish</i>	03251	-	√	Kelautan dan Perikanan / <i>Maritime and fishery</i>
73.	Pembesaran Ikan Air Tawar / <i>Rearing Freshwater fish</i>	03221	-	√	Kelautan dan Perikanan / <i>Maritime and fishery</i>
74.	Usaha Pengolahan Hasil Perikanan (UPI) : Industry Penggaraman. Pengeringan Ikan dan Biota Perairan Lainnya / <i>Fishery processing businesses (UPI): salt or dried fish and other water biota industries</i>	10211	-	√	Kelautan dan Perikanan / <i>Maritime and fishery</i>
75.	Usaha Pengolahan Hasil Perikanan (UPI): Industry Pengasapan Ikan dan Biota Perairan Lainnya / <i>Fishery processing businesses (UPI): smoked fish and other water biota industries</i>	10212	-	√	Kelautan dan Perikanan / <i>Maritime and fishery</i>
76.	Usaha Pengolahan Hasil Perikanan (UPI): Industri Peragian/Fermentasi Ikan dan produk Masak Lainnya (untuk usaha ekstraksi dan jelly ikan / <i>Fishery processing businesses (UPI): fish fermentation and other gourmet product (for extraction and fish jelly processing) industries</i>	10215	-	√	Kelautan dan Perikanan / <i>Maritime and fishery</i>
77.	Usaha Pengolahan Hasil Perikanan (UPI): Industri berbasis Daging Lumatan dan Surimi / <i>Fishery processing business (UPI): pulverized meat and surimi based industries</i>	10216	-	√	Kelautan dan Perikanan / <i>Maritime and fishery</i>
78.	Usaha Pemasaran, Distribusi, Perdagangan Besar, dan Ekspor Hasil Perikanan / <i>Fishery product marketing, distribution, wholesale, and export business</i>	46206	-	√	Kelautan dan Perikanan / <i>Maritime and fishery</i>
79.	Industri Pemindangan Ikan / <i>Cooked fish industries</i>	10214	√	-	Perindustrian / <i>Industry</i>
80.	Industri Tempe Kedelai / <i>Tempeh industries</i>	10391	√	-	Perindustrian / <i>Industry</i>
81.	Industri Tahu Kedelai / <i>Soy tofu industries</i>	10392	√	-	Perindustrian / <i>Industry</i>
82.	Industri Kue Basah / <i>Perishable cake Industries</i>	10792	√	-	Perindustrian / <i>Industry</i>
83.	Industri makanan dari Kedelai dan Kacang-kacangan Selain Kecap, Tempe dan Tahu / <i>Gourmet products from soybean and beans other than soy, sauce, tempeh, and soy tofu Industries</i>	10793	√	-	Perindustrian / <i>Industry</i>
84.	Industri Krupuk, Keripik, peyek dan sejenisnya / <i>Crackers, flakes, peyek, and the like Industries</i>	10794	√	-	Perindustrian / <i>Industry</i>
85.	Industri Gula Merah / <i>Brown sugar industries</i>	10722	√	-	Perindustrian / <i>Industry</i>
86.	Industri Pengupasan dan Pembersihan Umbi-umbian / <i>Root peeling and cleaning industries</i>	01630	√	-	Perindustrian / <i>Industry</i>

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

NO.	Bidang Usaha <i>Business Field</i>	KBLI	Persyaratan <i>Requirements</i>		Sektor <i>Sector</i>
			Dicadangkan untuk <i>Reserved for</i> UMKM	Kemitraan <i>Partnership</i>	
87.	Industri Pewarnaan Benang dari Serat Alam Maupun Serat Buatan Menjadi Benang Bermotif/ Celup, Ikat, dengan Alat yang Digerakkan Tangan / <i>Thread coloring from natural and artificial fiber to be patterned/dipped/tied thread, using hand tools Industries</i>	13122	√	-	Perindustrian / <i>Industry</i>
88.	Industri Percetakan Kain / <i>Cloth printing industries</i>	13133	√	-	Perindustrian / <i>Industry</i>
89.	Industri Batik Tulis / <i>Hand painted batik industries</i>	13134	√	-	Perindustrian / <i>Industry</i>
90.	Industri Kain Rajut Khususnya Renda / <i>Knitted cloth, especially lace, industries</i>	13911	√	-	Perindustrian / <i>Industry</i>
91.	Industri Bordir / <i>Embroidery industries</i>	13911	√	-	Perindustrian / <i>Industry</i>
92.	Industri Anyam-anyaman dari Rotan dan Bambu / <i>Rattan and bamboo plait industries</i>	16291	√	-	Perindustrian / <i>Industry</i>
93.	Industri Anyam-anyaman dari Tanaman Selain Rotan dan Bambu / <i>Other Than Rattan And Bamboo Plant Plait Industries</i>	16292	√	-	Perindustrian / <i>Industry</i>
94.	Industri Kerajinan Ukir-ukiran dari Kayu Kecuali Mebeler / <i>Carving handicrafts from wood industries, except furniture industries</i>	16293	√	-	Perindustrian / <i>Industry</i>
95.	Industri Alat-alat Dapur dari Kayu, Rotan dan Bambu / <i>Kitchen tool from wood rattan and bamboo industries</i>	16294	√	-	Perindustrian / <i>Industry</i>
96.	Industri dari Kayu, Rotan, Gabus, yang tidak diklasifikasikan di Tempat Lain / <i>Wood, rattan, and cork industries not classified elsewhere</i>	16299	√	-	Perindustrian / <i>Industry</i>
97.	Industri Alat-alat Musik Tradisional / <i>Traditional musical instrument Industries</i>	32201	√	-	Perindustrian / <i>Industry</i>
98.	Industri Mukena, Selendang, Kerudungm Dan Pakaian Tradisional Lainnya / <i>Moslem Woman's Praying Cloth, Scarf, Head Scarf, And Other Traditional clothing Industries</i>	14111	√	-	Perindustrian / <i>Industry</i>
99.	Industri Pengasapan Karet / <i>Rubber curing industries</i>	22121	√	-	Perindustrian / <i>Industry</i>
100.	Industri Barang dari Tanah liat untuk Keperluan Rumah Tangga Khusus Gerabah / <i>Clay made household needs especially pottery Industries</i>	23932	√	-	Perindustrian / <i>Industry</i>
101.	Industri Perkakas Tangan untuk Pertanian yang Diperlukan Untuk Persiapan Lahan Proses Produksi, Pemanenan, pasca panen, dan Pengolahan Kecuali Cangkul dan Sekop / <i>Hand tools for land farming preparation for production processes, harvesting, post-harvest, and processing except Industries, hoes and shovels.</i>	25931	√	-	Perindustrian / <i>Industry</i>

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

NO.	Bidang Usaha <i>Business Field</i>	KBLI	Persyaratan <i>Requirements</i>		Sektor <i>Sector</i>
			Dicadangkan untuk <i>Reserved for</i> UMKM	Kemitraan <i>Partnership</i>	
102.	Industri Perkakas Tangan Yang Diproses Secara Manual Atau Semi Mekanik Untuk Pertukangan Dan Pemotongan / <i>Manually Or Semi Mechanically Processed Hand Tools used for Handiwork and Cutting Industries</i>	25932 25933 25934	√	-	Perindustrian / <i>Industry</i>
103.	Industri Jasa Pemeliharaan dan perbaikan Sepeda motor Kecuali yang Terintegrasi dengan Bidang Usaha Penjualan Sepeda Motor (agen/distributor) / <i>Motorcycle maintenance and repair industries except those integrated into a motorcycle sales business (agent/distributor)</i>	45407	√	-	Perindustrian / <i>Industry</i>
104.	Indus tri Reparasi "Barang barang Keperluan Pribadi dan Rumah Tangga / <i>Personal and household needs repair industries</i>	95220 95240 95290	√	-	Perindustrian / <i>Industry</i>
105.	Industri Kopra / <i>Copra industries</i>	10421	-	√	Perindustrian / <i>Industry</i>
106.	Industri Asinan Buah-Buahan dan Sayur-Sayuran / <i>Salted fruits and vegetables industries</i>	10311	-	√	Perindustrian / <i>Industry</i>
107.	Indus tri Kecap / <i>Soy sauce industries</i>	10771	-	√	Perindustrian / <i>Industry</i>
108.	Indus tri Pengolahan Susu Bubuk dan Susu Kental Manis / <i>Milk powder processing and condensed milk industries</i>	10510	-	√	Perindustrian / <i>Industry</i>
109.	Industri Batik Cap/ <i>Printed batik industries</i>	13134	-	√	Perindustrian / <i>Industry</i>
110.	Industri Pengolahan Rotan / <i>Rattan processing industries</i>	16104	-	√	Perindustrian / <i>Industry</i>
111.	Industri Pengawetan Rotan, Bambu dan Sejenisnya / <i>Preserving rattan, bamboo, and the like industries</i>	16103	-	√	Perindustrian / <i>Industry</i>
112.	Industri Barang dari Kayu (Industri Moulding dan Komponen Bahan bangunan) / <i>Wood industries (moulding and construction material components)</i>	16221	-	√	Perindustrian / <i>Industry</i>
113.	Industri Minyak Atsiri / <i>Essential oil industries</i>	20294	-	√	Perindustrian / <i>Industry</i>
114.	Industri Pengeringan dan Pengolahan Tembakau / <i>Tobacco drying and processing industries</i>	12091	-	√	Perindustrian / <i>Industry</i>
115.	Industri Batu Bata dan Tanah Liat / <i>Brick and clay/ceramics industries</i>	23921	-	√	Perindustrian / <i>Industry</i>

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

NO.	Bidang Usaha <i>Business Field</i>	KBLI	Persyaratan <i>Requirements</i>		Sektor <i>Sector</i>
			Dicadangkan untuk <i>Reserved for</i> UMKM	Kemitraan <i>Partnership</i>	
116.	Industri Barang lainnya Dari Tanah liat / Keramik / <i>Goods Other than clay/ceramics Industries</i>	23939	-	√	Perindustrian / <i>Industry</i>
117.	Industri Kapur / <i>Lime industry</i>	23942	-	√	Perindustrian / <i>Industry</i>
118.	Industri Barang-barang dari Semen / <i>Goods made from cement industries</i>	23951	-	√	Perindustrian / <i>Industry</i>
119.	Industri Barang-barang dari Kapur / <i>Goods made from lime industries</i>	23952	-	√	Perindustrian / <i>Industry</i>
120.	Industri Barang-barang dari Semen dan kapur Lainnya / <i>Other goods made from cement and lime industries</i>	23959	-	√	Perindustrian / <i>Industry</i>
121.	Industri Paku, Mur, dan Baut / <i>Nails, nuts and bolts industries</i>	25952	-	√	Perindustrian / <i>Industry</i>
122.	Industri Komponen dan Suku cadang Motor Penggerak Mula / <i>Component and spare parts to start up motors industries</i>	28113	-	√	Perindustrian / <i>Industry</i>
123.	Industri Pompa dan Kompresor / <i>Pump and compressor industries</i>	28130	-	√	Perindustrian / <i>Industry</i>
124.	Industri Komponen dan Perlengkapan Kendaraan Bermotor Roda Dua, dan Tiga / <i>Component and accessories for two and three wheel vehicle industries</i>	30912	-	√	Perindustrian / <i>Industry</i>
125.	Industri Perlengkapan Sepeda dan Becak / <i>Bike and becak accessory industries</i>	30922	-	√	Perindustrian / <i>Industry</i>
126.	Industri Alat Mesin Pertanian yang Menggunakan Teknologi Madya Seperti Perontok Padi, Pemipil Jagung dan Traktor Tangan / <i>Agricultural machinery industries using medium technology, ie rice peelers, corn peelers, and hand tractors</i>	28210	-	√	Perindustrian / <i>Industry</i>
127.	Industri Kapal Kayu Untuk Wisata Bahari dan Untuk Penangkapan Ikan / <i>Wooden boat for maritime tourism and fishing industries</i>	30111 30120	-	√	Perindustrian / <i>Industry</i>
128.	Industri Peralatan dan Perlengkapan Kapal Kayu Untuk Wisata Bahari dan Untuk Penangkapan Ikan / <i>Wooden boat tools and equipment for maritime tourism and fishing industries</i>	30113	-	√	Perindustrian / <i>Industry</i>
129.	Industri Barang Perhiasan Berharga untuk Keperluan Pribadi dari Logam Mulia / <i>Jewelry made of precious metals for personal use industries</i>	32112	-	√	Perindustrian / <i>Industry</i>
130.	Industri Barang Perhiasan Berharga Bukan Untuk Keperluan Pribadi dari Logam Mulia / <i>Jewelry made of precious metals not for personal use industries</i>	32113	-	√	Perindustrian / <i>Industry</i>

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

NO.	Bidang Usaha <i>Business Field</i>	KBLI	Persyaratan <i>Requirements</i>		Sektor <i>Sector</i>
			Dicadangkan untuk <i>Reserved for</i> UMKM	Kemitraan <i>Partnership</i>	
131.	Industri Barang Perhiasan Bukan Untuk Keperluan pribadi dari Bukan Logam Mulia / <i>Jewelry not for personal use and not made from precious metals industries</i>	32120	-	√	Perindustrian / <i>Industry</i>
132.	Industri Permata / <i>Gemstone industries</i>	32111	-	√	Perindustrian / <i>Industry</i>
133.	Industri Kerajinan yang Tidak Diklasifikasikan di tempat Lain / <i>Handicraft industries not classified elsewhere</i>	32903	-	√	Perindustrian / <i>Industry</i>
134.	Industri Daur Ulang Barang-barang Bukan Logam / <i>Non-metal recycled goods industries</i>	38302	-	√	Perindustrian / <i>Industry</i>
135.	Industri Gula Pasir (gula kristal putih, gula kristal rafinasi, dan gula kristal mentah) Berbasis Tebu dengan Kemitraan dalam Bentuk Inti Plasma 20% dari Luas Lahan / <i>Sugarcane based Sugar industries (white crystal sugar, refined crystal sugar, and raw crystal sugar) in partnership in the form of a plasma core for 20% of the Land Area.</i>	10721	-	√	Perindustrian / <i>Industry</i>
136.	Jasa Konstruksi (Jasa Pelaksana Konstruksi) yang Menggunakan Teknologi Sederhana dan madya dan/atau Risiko Kecil dan Sedang dan/atau Nilai Pekerjaan Sampai dengan Rp50,000,000,000 / <i>Construction services (construction contractors) using simple/medium technology and/or small/medium risk and/or a work value up to Rp50,000,000,000</i>	00000	√	-	Pekerjaan Umum / <i>Public works</i>
137.	Jasa Bisnis/Jasa Konsultansi Konstruksi yang Menggunakan Teknologi Sederhana/Madya dan/atau Risiko Kecil/Sedang dan / atau Nilai Pekerjaan kurang dari Rp.10.000.000.000.00 / <i>Business or construction consultancy services using simple/medium technology and/or small/medium risk and/or a work value of less than Rp10,000,000,000</i>	00000	√	-	Pekerjaan Umum / <i>Public works</i>
138.	Perdagangan Eceran Melalui Pemesanan Pos dan Internet / <i>Retail trading through mail and internet orders</i>	47911 47912 47913 47914	-	√	Perdagangan / <i>Trade</i>
139.	Agen Perjalanan Wisata / <i>Travel agent</i>	79111	√	-	Pariwisata dan Ekonomi Kreatif / <i>Tourism and the creative economy</i>
140.	Pondok Wisata / <i>Homestay</i>	55130	√	-	Pariwisata dan Ekonomi Kreatif / <i>Tourism and creative economy</i>

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

NO.	Bidang Usaha <i>Business Field</i>	KBLI	Persyaratan <i>Requirements</i>		Sektor <i>Sector</i>
			Dicadangkan untuk <i>Reserved for</i> UMKM	Kemitraan <i>Partnership</i>	
141.	Sanggar Seni / <i>Art gallery</i>	90001	√	-	Pariwisata dan Ekonomi Kreatif / <i>Tourism and the</i> <i>creative economy</i>
142.	Usaha Jasa Pramuwisata / <i>Tour guide services</i>	79921	√	-	Pariwisata dan Ekonomi Kreatif / <i>Tourism and the</i> <i>creative economy</i>
143.	Lembaga Penyiaran Komunitas (LPK) Radio dan Televisi / <i>Radio And Television Community Broadcaster</i>	60102 60202	√	-	Komunikasi dan Informatika / <i>Communication and</i> <i>informatics</i>
144.	Instalasi Kabel ke Rumah dan Gedung / <i>House and building Cable installation</i>	43212	√	-	Komunikasi dan Informatika / <i>Communication and</i> <i>informatics</i>
145.	Warung Internet / <i>Internet cafes</i>	61994	√	-	Komunikasi dan Informatika / <i>Communication and</i> <i>informatics</i>

Catatan:

- √ = Mengikuti persyaratan kolom tersebut.
- Dalam hal Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KELT) meliputi lebih dari satu bidang usaha, maka persyaratan sebagaimana termaksud dalam Lampiran IT hanya berlaku bagi Bidang Usaha yang tercantum dalam kolom Bidang Usaha tersebut.
- Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKM) adalah orang perorangan atau badan usaha yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Note:

- √ = Following the requirement column.
- In the event that the Indonesian Standard Classification of Business Fields (KBLI) includes more than one business field, the provisions referred to in Appendix II only apply to the business fields listed in the business field column.
- Micro, small, and medium-scale enterprises and cooperatives (UMKM) in this Presidential Regulation are individuals or entities that meet the criteria under Law No. 20 of 2008 on Micro, Small, and Medium-scale Enterprises.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

4. Kemitraan adalah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

4. Partnerships are those listed in Government Regulation Number 17 of 2013 on The Implementation of Law No. 20 of 2008 on Micro, Small, and Medium-scale Enterprises.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

Ttd./ *signed*

Joko Widodo

Salinan Sesuai dengan aslinya
A copy the same as the original

SEKRETARIAT KABINET RI
THE CABINET SECRETARIAT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
Deputi Bidang Perekonomian
Deputy for the Economic Sector

Ttd / *signed*

Agustina Murbaningsih

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

LAMPIRAN III

ANNEX III

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

REGULATION OF THE PRESIDENT
OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

NOMOR 44 TAHUN 2016

NUMBER 44 OF 2016

TENTANG

REGARDING

DAFTAR BIDANG USAHA YANG TERTUTUP DAN
BIDANG USAHA YANG TERBUKA DENGAN
PERSYARATAN DI BIDANG PENANAMAN MODAL

LIST OF BUSINESS FIELDS WHICH ARE CLOSED
TO INVESTMENT AND BUSINESS FIELDS WHICH
ARE CONDITIONALLY OPEN TO INVESTMENT

DAFTAR BIDANG USAHA YANG TERBUKA DENGAN PERSYARATAN TERTENTU

LIST OF CERTAIN CONDITIONALLY OPEN BUSINESS FIELDS

A. Sektor Pertanian / Agriculture Sector

NO.	BIDANG USAHA <i>BUSINESS FIELD</i>	KBLI	PERSYARATAN <i>REQUIREMENTS</i>
	Usaha Perbenihan/ Pembibitan Tanaman Pangan Pokok dengan Luas lebih dari 25 Ha: / <i>Main Crop/Seeding Businesses with an Area of more than 25 Hectares:</i>		
1.	Padi / <i>Rice plants</i>	01121 01122	Penanaman Modal Asing Maksimal 49% / <i>Maximum 49% Foreign Capital Investment</i>
2.	Jagung / <i>Corn</i>	01111	Penanaman Modal Asing Maksimal 49% / <i>Maximum 49% Foreign Capital Investment</i>
3.	Kedelai / <i>Soy beans</i>	01113	Penanaman Modal Asing Maksimal 49% / <i>Maximum 49% Foreign Capital Investment</i>
4.	Kacang Tanah / <i>Peanuts</i>	01114	Penanaman Modal Asing Maksimal 49% / <i>Maximum 49% Foreign Capital Investment</i>
5.	Kacang Hijau / <i>Green Beans</i>	01115	Penanaman Modal Asing Maksimal 49% / <i>Maximum 49% Foreign Capital Investment</i>
6.	Tanaman Pangan Lainnya (ubi kayu dan ubi jalar) / Other food plants (cassava and sweet potato)	01135	Penanaman Modal Asing Maksimal 49% / <i>Maximum 49% Foreign Capital Investment</i>
	Usaha Budidaya Tanaman Pangan Pokok dengan Luas lebih dari 25 Ha: / <i>Main crop plant cultivation businesses, with a land area of less than 25 Ha:</i>		
7.	Padi / <i>Rice plants</i>	01121 01122	Penanaman Modal Asing Maksimal 49% / <i>Maximum 49% Foreign Capital Investment</i>

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

NO.	BIDANG USAHA <i>BUSINESS FIELD</i>	KBLI	PERSYARATAN <i>REQUIREMENTS</i>
8.	Jagung / <i>Corn</i>	01111	Penanaman Modal Asing Maksimal 49% / <i>Maximum 49% Foreign Capital Investment</i>
9.	Kedelai / <i>Soy beans</i>	01113	Penanaman Modal Asing Maksimal 49% / <i>Maximum 49% Foreign Capital Investment</i>
10.	Kacang Tanah / <i>Peanuts</i>	01114	Penanaman Modal Asing Maksimal 49% / <i>Maximum 49% Foreign Capital Investment</i>
11.	Kacang Hijau / <i>Green Beans</i>	01115	Penanaman Modal Asing Maksimal 49% / <i>Maximum 49% Foreign Capital Investment</i>
12.	Tanaman Pangan Lainnya (ubi kayu dan ubi jalar) / <i>Other food plants (cassava and sweet potato)</i>	01116	Penanaman Modal Asing Maksimal 49% / <i>Maximum 49% Foreign Capital Investment</i>
Usaha Industri Perbenihan Perkebunan dengan Luas 25 Ha atau Lebih: / <i>Plantation seeding businesses, with a land area of 25 Hectares or More:</i>			
13.	Tanaman Jarak Pagar / <i>Jatropha curcas plants</i>	01299	a. Penanaman Modal Asing Maksimal 95% / <i>Maximum 95% Foreign Capital Investment</i> b. Kewajiban Perkebunan Plasma Sebesar 20% / <i>Obligation for 20% to be Plasma Plantation</i>
14.	Tanaman Pemanis Lainnya / <i>Other sweetening plants</i>	01137	a. Penanaman Modal Asing Maksimal 95% / <i>Maximum 95% Foreign Capital Investment</i> b. Kewajiban Perkebunan Plasma Sebesar 20% / <i>Obligation for 20% to be Plasma Plantation</i>
15.	Tanaman Tebu / <i>Sugarcane plants</i>	01140	a. Penanaman Modal Asing Maksimal 95% / <i>Maximum 95% Foreign Capital Investment</i> b. Kewajiban Perkebunan Plasma Sebesar 20% / <i>Obligation for 20% to be Plasma Plantation</i>
16.	Tanaman Tembakau / <i>Tobacco plants</i>	01150	a. Penanaman Modal Asing Maksimal 95% / <i>Maximum 95% Foreign Capital Investment</i> b. Kewajiban Perkebunan Plasma Sebesar 20% / <i>Obligation 20% to be Plasma Plantation</i>
17.	Tanaman Bahan Baku Tekstil dan Tanaman Kapas / <i>Raw Textile material and cotton plants</i>	01160	a. Penanaman Modal Asing Maksimal 95% / <i>Maximum 95% Foreign Capital Investment</i> b. Kewajiban Perkebunan Plasma Sebesar 20% / <i>Obligation for 20% to be Plasma Plantation</i>
18.	Tanaman Jambu Mete / <i>Cashew plants</i>	01252	a. Penanaman Modal Asing Maksimal 95% / <i>Maximum 95% Foreign Capital Investment</i> b. Kewajiban Perkebunan Plasma Sebesar 20% / <i>Obligation for 20% to be Plasma Plantation</i>
19.	Tanaman Kelapa / <i>Coconut plants</i>	01261	a. Penanaman Modal Asing Maksimal 95% / <i>Maximum 95% Foreign Capital Investment</i> b. Kewajiban Perkebunan Plasma Sebesar 20% / <i>Obligation for 20% to be Plasma Plantation</i>
20.	Tanaman Kelapa Sawit / <i>Palm plants</i>	01262	a. Penanaman Modal Asing Maksimal 95% / <i>Maximum 95% Foreign Capital Investment</i> b. Kewajiban Perkebunan Plasma Sebesar 20% / <i>Obligation of 20% to be Plasma Plantation</i>
21.	Tanaman Untuk Bahan Minuman (Teh, Kopi dan Kakao) / <i>Crop plants for beverage materials (tea, coffee, and cacao)</i>	01270	a. Penanaman Modal Asing Maksimal 95% / <i>Maximum 95% Foreign Capital Investment</i> b. Kewajiban Perkebunan Plasma Sebesar 20% / <i>Obligation for 20% to be Plasma Plantation</i>

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

NO.	BIDANG USAHA <i>BUSINESS FIELD</i>	KBLI	PERSYARATAN <i>REQUIREMENTS</i>
22.	Tanaman Lada / <i>Pepper plants</i>	01281	a. Penanaman Modal Asing Maksimal 95% / <i>Maximum 95% Foreign Capital Investment</i> b. Kewajiban Perkebunan Plasma Sebesar 20% / <i>Obligation for 20% to be Plasma Plantation</i>
23.	Tanaman Cengkeh / <i>Clove plants</i>	01282	a. Penanaman Modal Asing Maksimal 95% / <i>Maximum 95% Foreign Capital Investment</i> b. Kewajiban Perkebunan Plasma Sebesar 20% / <i>Obligation for 20% to be Plasma Plantation</i>
24.	Tanaman Minyak Atsiri / <i>Essential oil plants</i>	01284	a. Penanaman Modal Asing Maksimal 95% / <i>Maximum 95% Foreign Capital Investment</i> b. Kewajiban Perkebunan Plasma Sebesar 20% / <i>Obligation for 20% to be Plasma Plantation</i>
25.	Tanaman Obat/Bahan Farmasi / <i>Medicine/pharmaceutical crop plants (other than horticulture)</i>	01285 01286	a. Penanaman Modal Asing Maksimal 95% / <i>Maximum 95% Foreign Capital Investment</i> b. Kewajiban Perkebunan Plasma Sebesar 20% / <i>Obligation for 20% to be Plasma Plantation</i>
26.	Tanaman Rempah Lainnya / <i>Other spice crop plants</i>	01289	a. Penanaman Modal Asing Maksimal 95% / <i>Maximum 95% Foreign Capital Investment</i> b. Kewajiban Perkebunan Plasma Sebesar 20% / <i>Obligation for 20% to be Plasma Plantation</i>
27.	Tanaman Karet dan Penghasil Getah Lainnya / <i>Rubber and Other Sap Producing plants</i>	01291	a. Penanaman Modal Asing Maksimal 95% / <i>Maximum 95% Foreign Capital Investment</i> b. Kewajiban Perkebunan Plasma Sebesar 20% / <i>Obligation for 20% to be Plasma Plantation</i>
28.	Tanaman Lainnya yang Tidak Diklasifikasikan di Tempat Lain / <i>Other crop plants that are not classified elsewhere</i>	01299	a. Penanaman Modal Asing Maksimal 95% / <i>Maximum 95% Foreign Capital Investment</i> b. Kewajiban Perkebunan Plasma Sebesar 20% / <i>Obligation for 20% to be Plasma Plantation</i>
Usaha Perkebunan dengan Luas 25 Ha atau Lebih Sampai Luasan Tertentu Tanpa Unit / <i>Plantation businesses with an Area of 25 Hectares or More up to a Certain Area, without a Processing Unit</i>			
29.	Perkebunan Jarak Pagar / <i>Jatropha Curcas plantations</i>	01299	a. Penanaman Modal Asing Maksimal 95% / <i>Maximum 95% Foreign Capital Investment</i> b. Kewajiban Perkebunan Plasma Sebesar 20% / <i>Obligation for 20% to be Plasma Plantation</i>
30.	Perkebunan Pemanis Lainnya / <i>Other sweetener plantations</i>	01137	a. Penanaman Modal Asing Maksimal 95% / <i>Maximum 95% Foreign Capital Investment</i> b. Kewajiban Perkebunan Plasma Sebesar 20% / <i>Obligation for 20% to be Plasma Plantation</i>
31.	Perkebunan Tebu / <i>Sugarcane plantations</i>	01140	a. Penanaman Modal Asing Maksimal 95% / <i>Maximum 95% Foreign Capital Investment</i> b. Kewajiban Perkebunan Plasma Sebesar 20% / <i>Obligation for 20% to be Plasma Plantation</i>
32.	Perkebunan Tembakau / <i>Tobacco plantations</i>	01150	a. Penanaman Modal Asing Maksimal 95% / <i>Maximum 95% Foreign Capital Investment</i> b. Kewajiban Perkebunan Plasma Sebesar 20% / <i>Obligation for 20% to be Plasma Plantation</i>

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

NO.	BIDANG USAHA <i>BUSINESS FIELD</i>	KBLI	PERSYARATAN <i>REQUIREMENTS</i>
33.	Perkebunan Bahan Baku Tekstil dan Tanaman Kapas / <i>Textile raw material plantations and cotton plants</i>	01160	a. Penanaman Modal Asing Maksimal 95% / <i>Maximum 95% Foreign Capital Investment</i> b. Kewajiban Perkebunan Plasma Sebesar 20% / <i>Obligation for 20% to be Plasma Plantation</i>
34.	Perkebunan Lainnya yang Tidak Diklasifikasikan di Tempat lain / <i>Other plantations not classified elsewhere</i>	01299	a. Penanaman Modal Asing Maksimal 95% / <i>Maximum 95% Foreign Capital Investment</i> b. Kewajiban Perkebunan Plasma Sebesar 20% / <i>Obligation for 20% to be Plasma Plantation</i>
35.	Perkebunan Jambu Mete / <i>Cashew plantations</i>	01252	a. Penanaman Modal Asing Maksimal 95% / <i>Maximum 95% Foreign Capital Investment</i> b. Kewajiban Perkebunan Plasma Sebesar 20% / <i>Obligation for 20% to be Plasma Plantation</i>
36.	Perkebunan Kelapa / <i>Coconut plantations</i>	01261	a. Penanaman Modal Asing Maksimal 95% / <i>Maximum 95% Foreign Capital Investment</i> b. Kewajiban Perkebunan Plasma Sebesar 20% / <i>Obligation for 20% to be Plasma Plantation</i>
37.	Perkebunan Kelapa Sawit / <i>Palm plantations</i>	01262	a. Penanaman Modal Asing Maksimal 95% / <i>Maximum 95% Foreign Capital Investment</i> b. Kewajiban Perkebunan Plasma Sebesar 20% / <i>Obligation for 20% to be Plasma Plantation</i>
38.	Perkebunan Untuk Baban Minuman (Teh, Kopi dan Kakao) / <i>Crops for beverage materials plantations (tea, coffee, and cacao)</i>	01270	a. Penanaman Modal Asing Maksimal 95% / <i>Maximum 95% Foreign Capital Investment</i> b. Kewajiban Perkebunan Plasma Sebesar 20% / <i>Obligation for 20% to be Plasma Plantation</i>
39.	Perkebunan Lada / <i>Pepper plantations</i>	01281	a. Penanaman Modal Asing Maksimal 95% / <i>Maximum 95% Foreign Capital Investment</i> b. Kewajiban Perkebunan Plasma Sebesar 20% / <i>Obligation for 20% to be Plasma Plantation</i>
40.	Perkebunan Cengkeh / <i>Clove plantations</i>	01282	a. Penanaman Modal Asing Maksimal 95% / <i>Maximum 95% Foreign Capital Investment</i> b. Kewajiban Perkebunan Plasma Sebesar 20% / <i>Obligation for 20% to be Plasma Plantation</i>
41.	Perkebunan Minyak Atsiri / <i>Essential oil crop plantations</i>	01284	a. Penanaman Modal Asing Maksimal 95% / <i>Maximum 95% Foreign Capital Investment</i> b. Kewajiban Perkebunan Plasma Sebesar 20% / <i>Obligation for 20% to be Plasma Plantation</i>
42.	Perkebunan Obat/Bahan Farmasi / <i>Medicinal/ pharmaceutical material plantations (other than horticulture)</i>	01285 01286	a. Penanaman Modal Asing Maksimal 95% / <i>Maximum of 95% Foreign Capital Investment</i> b. Kewajiban Perkebunan Plasma Sebesar 20% / <i>Obligation for 20% to be Plasma Plantation</i>
43.	Perkebunan Rempah Lainnya / <i>Other spice crop plantations</i>	01289	a. Penanaman Modal Asing Maksimal 95% / <i>Maximum 95% Foreign Capital Investment</i> b. Kewajiban Perkebunan Plasma Sebesar 20% / <i>Obligation for 20% to be Plasma Plantation</i>
44.	Perkebunan Keret dan Penghasil Getah Lainnya / <i>Rubber plantations and other sap producing plantations</i>	01291	a. Penanaman Modal Asing Maksimal 95% / <i>Maximum 95% Foreign Capital Investment</i> b. Kewajiban Perkebunan Plasma Sebesar 20% / <i>Obligation for 20% to be Plasma Plantation</i>

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

NO.	BIDANG USAHA <i>BUSINESS FIELD</i>	KBLI	PERSYARATAN <i>REQUIREMENTS</i>
	Usaha Perkebunan dengan Luas 25 Ha atau Lebih yang Terintegrasi dengan Unit Pengolahan dengan Kapasitas Sama atau Melebihi Kapasitas Tertentu: / <i>Plantation businesses with a land area of 25 Ha or more, with an integrated processing unit of the same capacity or exceeding a certain capacity:</i>		
45.	Perkebunan Jambu Mete dan Industri Biji Mete Kering dan Cashew Nut Shell Liquid (CNSL) / <i>Cashew Plantations and dry cashew seed and CNSL industries</i>	01252 10399	a. Penanaman Modal Asing Maksimal 95% / <i>Maximum 95% Foreign Capital Investment</i> b. Kewajiban Perkebunan Plasma Sebesar 20% / <i>Obligation for 20% to be Plasma Plantation</i>
46.	Perkebunan Lada dan Industri Biji Lada Putih Kering dan Biji Lada Hitam Kering / <i>Pepper plantation and dry white peppercorn and dry black peppercorn industry</i>	01281 10399	a. Penanaman Modal Asing Maksimal 95% / <i>Maximum 95% Foreign Capital Investment</i> b. Kewajiban Perkebunan Plasma Sebesar 20% / <i>Obligation for 20% to be Plasma Plantation</i>
47.	Perkebunan Jarak dan Industri Minyak Jarak Pagar / <i>Jatropha Curcas Plantations and Jatropha Curcas oil industries</i>	01299 20294	a. Penanaman Modal Asing Maksimal 95% / <i>Maximum 95% Foreign Capital Investment</i> b. Kewajiban Perkebunan Plasma Sebesar 20% / <i>Obligation for 20% to be Plasma Plantation</i>
48.	Perkebunan Tebu, Industri Gula Pasir, Pucuk Tebu, dan Bagas / <i>Sugar Cane Plantations, Sugar, Sugar Cane, and Sugar Cane Residue Industries</i>	01140 10721	a. Penanaman Modal Asing Maksimal 95% / <i>Maximum of 95% Foreign Capital Investment</i> b. Kewajiban Perkebunan Plasma Sebesar 20% / <i>Obligation for 20% to be Plasma Plantation</i>
49.	Perkebunan Tembakau dan Industri Daun Tembakau Kering / <i>Tobacco Plantations and Dry Tobacco Leaf Industries</i>	01150 12091	a. Penanaman Modal Asing Maksimal 95% / <i>Maximum 95% Foreign Capital Investment</i> b. Kewajiban Perkebunan Plasma Sebesar 20% / <i>Obligation for 20% to be Plasma Plantation</i>
50.	Perkebunan Kapas dan Industri Serat Kapas / <i>Cotton Plantations and Cotton Fiber and Seed Industries</i>	01160	a. Penanaman Modal Asing Maksimal 95% / <i>Maximum 95% Foreign Capital Investment</i> b. Kewajiban Perkebunan Plasma Sebesar 20% / <i>Obligation for 20% to be Plasma Plantation</i>
51.	Perkebunan Kelapa dan Industri Minyak Kelapa / <i>Coconut Plantations and Coconut Oil Industries</i>	01261 10423	a. Penanaman Modal Asing Maksimal 95% / <i>Maximum 95% Foreign Capital Investment</i> b. Kewajiban Perkebunan Plasma Sebesar 20% / <i>Obligation for 20% to be Plasma Plantation</i>
52.	Perkebunan Kelapa dan Industri Kopra, Serat (fiber), Arang Tempurung, Debu (dust), Nata de Coco / <i>Coconut and Copra Plantations, Fiber, Coconut Charcoal, Dust, Nata De Coco Industries</i>	01261 10421 10773	a. Penanaman Modal Asing Maksimal 95% / <i>Maximum 95% Foreign Capital Investment</i> b. Kewajiban Perkebunan Plasma Sebesar 20% / <i>Obligation for 20% to be Plasma Plantation</i>
53.	Perkebunan Kelapa Sawit dan Industri Minyak Kelapa Sawit (CPO) / <i>Palm plantations and Crude Palm Oil (CPO) industries</i>	01262 10432	a. Penanaman Modal Asing Maksimal 95% / <i>Maximum 95% Foreign Capital Investment</i> b. Kewajiban Perkebunan Plasma Sebesar 20% / <i>Obligation for 20% to be Plasma Plantation</i>
54.	Perkebunan Keping dan Industri Pengupasan, Pembersihan dan Sortasi Kopi / <i>Coffee plantations and coffee peeling, cleaning, and sorting industries</i>	01270 10399	a. Penanaman Modal Asing Maksimal 95% / <i>Maximum 95% Foreign Capital Investment</i> b. Kewajiban Perkebunan Plasma Sebesar 20% / <i>Obligation for 20% to be Plasma Plantation</i>
55.	Perkebunan Kakao dan Industri Pengupasan, Pembersihan dan Pengeringan Kakao / <i>Cacao plantations and Cacao peeling, cleaning, and drying industries</i>	01270 10399	a. Penanaman Modal Asing Maksimal 95% / <i>Maximum 95% Foreign Capital Investment</i> b. Kewajiban Perkebunan Plasma Sebesar 20% / <i>Obligation for 20% to be Plasma Plantation</i>

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

NO.	BIDANG USAHA <i>BUSINESS FIELD</i>	KBLI	PERSYARATAN <i>REQUIREMENTS</i>
56.	Perkebunan Teh dan Industri Teh Hitam/Teh Hijau / <i>Tea plantations, and black/green tea industries</i>	01270 10763	a. Penanaman Modal Asing Maksimal 95% / <i>Maximum 95% Foreign Capital Investment</i> b. Kewajiban Perkebunan Plasma Sebesar 20% / <i>Obligation for 20% to be Plasma Plantation</i>
57.	Perkebunan Cengkeh dan Industri Bunga Cengkeh Kering / <i>Clove plantations and dry clove flower industries</i>	01282 10772	a. Penanaman Modal Asing Maksimal 95% / <i>Maximum 95% Foreign Capital Investment</i> b. Kewajiban Perkebunan Plasma Sebesar 20% / <i>Obligation for 20% to be Plasma Plantation</i>
58.	Perkebunan Tanaman Minyak Atsiri dan Industri Minyak Atsiri / <i>Essential oil crop plantations and essential oil industries</i>	01284 20294	a. Penanaman Modal Asing Maksimal 95% / <i>Maximum 95% Foreign Capital Investment</i> b. Kewajiban Perkebunan Plasma Sebesar 20% / <i>Obligation for 20% to be Plasma Plantation</i>
59.	Perkebunan Karet dan Industri Sheet, Lateks Pekat / <i>Rubber plantations and Sheet, thick latex industries</i>	01291 22121 22122	a. Penanaman Modal Asing Maksimal 95% / <i>Maximum 95% Foreign Capital Investment</i> b. Kewajiban Perkebunan Plasma Sebesar 20% / <i>Obligation for 20% to be Plasma Plantation</i>
60.	Perkebunan Biji-bijian selain Kopi dan Kakao dan Industri Pengupasan dan Pembersihan Biji-Bijian Selain Kopi dan Kakao / <i>Seed plantations other than coffee and cacao, and peeling and cleaning seeds other than coffee and cacao industries</i>	10399	a. Penanaman Modal Asing Maksimal 95% / <i>Maximum 95% Foreign Capital Investment</i> b. Kewajiban Perkebunan Plasma Sebesar 20% / <i>Obligation for 20% to be Plasma Plantation</i>
Usaha dengan Kapasitas Sama atau Melebihi Kapasitas Tertentu: / <i>Businesses with the same capacity or exceeding a certain capacity:</i>			
61.	Industri Minyak Mentah (minyak makan) dari Nabati dan Hewani / <i>Crude oils (edible oils) from plants and animals industries</i>	10411	a. Penanaman Modal Asing Maksimal 95% / <i>Maximum 95% Foreign Capital Investment</i> b. Bahan Baku Minimal 20% Berasal dari Kebun Sendiri / <i>at least 20% of the Raw Materials must Originate from Own Plantations</i>
62.	Industri Kopra, Serat (fiber), Arang Tempurung, Debu (dust), Nata de Coco / <i>Copra, fiber, coconut shell charcoal, dust, Nata de Coco industries</i>	10421	a. Penanaman Modal Asing Maksimal 95% / <i>Maximum 95% Foreign Capital Investment</i> b. Bahan Baku Minimal 20% Berasal dari Kebun Sendiri / <i>at least 20% of the Raw Materials must Originate from Own Plantation</i>
63.	Industri Minyak Kelapa / <i>Coconut oil industries</i>	10423	a. Penanaman Modal Asing Maksimal 95% / <i>Maximum 95% Foreign Capital Investment</i> b. Bahan Baku Minimal 20% Berasal dari Kebun Sendiri / <i>At least of 20% of the Raw Materials must Originate from Own Plantations</i>
64.	Industri Minyak Kelapa Sawit / <i>Palm oil industries</i>	10432	a. Penanaman Modal Asing Maksimal 95% / <i>Maximum 95% Foreign Capital Investment</i> b. Bahan Baku Minimal 20% Berasal dari Kebun Sendiri / <i>At least of 20% of the Raw Materials must Originate from Own Plantations</i>
65.	Industri Pengupasan, Pembersihan, Pengeringan dan Sortasi Hasil Perkebunan (kakao dan kopi) / <i>Peeling, Cleaning, Drying and Sorting of Crops (Cacao and Coffee)</i>	10399	a. Penanaman Modal Asing Maksimal 95% / <i>Maximum 95% Foreign Capital Investment</i> b. Bahan Baku Minimal 20% Berasal dari Kebun Sendiri / <i>At least of 20% of the Raw Materials must Originate from Own Plantation</i>
66.	Industri Gula Pasir. Pucuk Tebu, dan Bagas / <i>Sugar, sugarcane, and</i>	10721	a. Penanaman Modal Asing Maksimal 95% / <i>Maximum 95% Foreign Capital Investment</i>

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

NO.	BIDANG USAHA <i>BUSINESS FIELD</i>	KBLI	PERSYARATAN <i>REQUIREMENTS</i>
	<i>sugarcane residue industries</i>		b. Bahan Baku Minimal 20% Berasal dari Kebun Sendiri / <i>At least of 20% of the Raw Materials must Originate from Own Plantations</i>
67.	Industri The Hitam/The Hijau / <i>Black/green tea industries</i>	10763	a. Penanaman Modal Asing Maksimal 95% / <i>Maximum 95% Foreign Capital Investment</i> b. Bahan Baku Minimal 20% Berasal dari Kebun Sendiri / <i>At least of 20% of the Raw Materials must Originate from Own Plantations</i>
68.	Industri Tembakau Kering (Krosok) / <i>Dry tobacco leaves industries (Krosok) /</i>	12091	a. Penanaman Modal Asing Maksimal 95% / <i>Maximum 95% Foreign Capital Investment</i> b. Bahan Baku Minimal 20% Berasal dari Kebun Sendiri / <i>At least of 20% of the Raw Materials must Originate from Own Plantation</i>
69.	Industri Minyak Jarak Kasar / <i>Coarse Castor oil industries</i>	20294	a. Penanaman Modal Asing Maksimal 95% / <i>Maximum 95% Foreign Capital Investment</i> b. Bahan Baku Minimal 20% Berasal dari Kebun Sendiri / <i>At least of 20% of the Raw Materials must Originate from Own Plantations</i>
70.	Industri Serat Kapas dan Biji Kapas / <i>Cotton fiber and cotton seed Industries</i>	01630 10490	a. Penanaman Modal Asing Maksimal 95% / <i>Maximum 95% Foreign Capital Investment</i> b. Bahan Baku Minimal 20% Berasal dari Kebun Sendiri / <i>At least of 20% of the Raw Materials must Originate from Own Plantations</i>
71.	Industri Karet Menjadi Sheet, Lateks Pekat / <i>Rubber into sheet, thick latex industries</i>	22121 22122	a. Penanaman Modal Asing Maksimal 95% / <i>Maximum 95% Foreign Capital Investment</i> b. Bahan Baku Minimal 20% Berasal dari Kebun Sendiri / <i>At least of 20% of the Raw Materials must Originate from Own Plantations</i>
72.	Industri Jambu Mete Menjadi Biji Mete Kering dan Cashew Nut Shell Liquid (CNSL) / <i>Cashew industries to become dry shell cashew nut and CNSL.</i>	10614	a. Penanaman Modal Asing Maksimal 95% / <i>Maximum 95% Foreign Capital Investment</i> b. Bahan Baku Minimal 20% Berasal dari Kebun Sendiri / <i>At least of 20% of the Raw Materials must Originate from Own Plantation</i>
73.	Industri Lada Menjadi Biji Lada Putih Kering dan Biji Lada Hitam Kering / <i>Pepper industries to become dry white pepper seed and dry black pepper seed</i>	10614	a. Penanaman Modal Asing Maksimal 95% / <i>Maximum 95% Foreign Capital Investment</i> b. Bahan Baku Minimal 20% Berasal dari Kebun Sendiri / <i>At least of 20% of the Raw Materials must Originate from Own Plantation</i>
74.	Industri Bunga Cengkeh / <i>Dry clove flower industries</i>	01630	a. Penanaman Modal Asing Maksimal 95% / <i>Maximum 95% Foreign Capital Investment</i> b. Bahan Baku Minimal 20% Berasal dari Kebun Sendiri / <i>At least of 20% of the Raw Materials must Originate from Own Plantation</i>
75.	Perbenihan Tanaman Buah Semusim / <i>One-season fruit plant seeding</i>	01139	Penanaman Modal Asing Maksimal 30% / <i>Maximum 30% Foreign Capital Investment</i>

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

NO.	BIDANG USAHA <i>BUSINESS FIELD</i>	KBLI	PERSYARATAN <i>REQUIREMENTS</i>
76.	Perbenihan Anggur / <i>Grape seeding</i>	01210	Penanaman Modal Asing Maksimal 30% / <i>Maximum 30% Foreign Capital Investment</i>
77.	Perbenihan Buah Tropis / <i>Tropical fruit seeding</i>	01220	Penanaman Modal Asing Maksimal 30% / <i>Maximum 30% Foreign Capital Investment</i>
78.	Perbenihan Jeruk / <i>Orange seeding</i>	01230	Penanaman Modal Asing Maksimal 30% / <i>Maximum 30% Foreign Capital Investment</i>
79.	Perbenihan Apel dan Buah Batu (<i>Pome and Stone Fruit</i>) / <i>Pome and Stone Fruit seeding</i>	01240	Penanaman Modal Asing Maksimal 30% / <i>Maximum 30% Foreign Capital Investment</i>
80.	Perbenihan Buah Beri / <i>Berry fruits seeding</i>	01251	Penanaman Modal Asing Maksimal 30% / <i>Maximum 30% Foreign Capital Investment</i>
81.	Perbenihan Tanaman Sayuran Semusim / <i>One-season vegetable plant seeding</i>	01139	Penanaman Modal Asing Maksimal 30% / <i>Maximum 30% Foreign Capital Investment</i>
82.	Perbenihan Tanaman Sayuran Tahunan / <i>Annual vegetable plant seeding</i>	01253	Penanaman Modal Asing Maksimal 30% / <i>Maximum 30% Foreign Capital Investment</i>
83.	Perbenihan Tanatnan Obat / <i>Medicinal plants seeding</i>	01285 01286	Penanaman Modal Asing Maksimal 30% / <i>Maximum 30% Foreign Capital Investment</i>
84.	Perbenihan Jamur / <i>Mushroom seeding</i>	01139	Penanaman Modal Asing Maksimal 30% / <i>Maximum 30% Foreign Capital Investment</i>
85.	Perbenihan Tanaman Florikultura / <i>Floriculture plant seeding</i>	01194 01302	Penanaman Modal Asing Maksimal 30% / <i>Maximum 30% Foreign Capital Investment</i>
86.	Budidaya Buah Semusim / <i>One-season fruit plant cultivation</i>	01132	Penanaman Modal Asing Maksimal 30% / <i>Maximum 30% Foreign Capital Investment</i>
87.	Budidaya Anggur / <i>Grape cultivation</i>	01210	Penanaman Modal Asing Maksimal 30% / <i>Maximum 30% Foreign Capital Investment</i>
88.	Budidaya Buah Tropis / <i>Tropical fruit cultivation</i>	01220	Penanaman Modal Asing Maksimal 30% / <i>Maximum 30% Foreign Capital Investment</i>
89.	Budidaya Jeruk / <i>Orange cultivation</i>	01230	Penanaman Modal Asing Maksimal 30% / <i>Maximum 30% Foreign Capital Investment</i>
90.	Budidaya Apel dan Buah Batu (<i>Pome and Stone Fruit</i>) / <i>Apple and Stone Fruit cultivation</i>	01240	Penanaman Modal Asing Maksimal 30% / <i>Maximum 30% Foreign Capital Investment</i>
91.	Budidaya Buah Beri / <i>Berry fruits cultivation</i>	01251	Penanaman Modal Asing Maksimal 30% / <i>Maximum 30% Foreign Capital Investment</i>
92.	Budidaya Sayuran Daun (antara lain: kubis, sawi, bawang daun, seledri) / <i>Leaf vegetable cultivation (among others: cabbage, mustard greens, leek, celery)</i>	01131	Penanaman Modal Asing Maksimal 30% / <i>Maximum 30% Foreign Capital Investment</i>
93.	Budidaya Sayuran Umbi (antara lain:	01134	Penanaman Modal Asing Maksimal 30% / <i>Maximum</i>

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

NO.	BIDANG USAHA <i>BUSINESS FIELD</i>	KBLI	PERSYARATAN <i>REQUIREMENTS</i>
	bawang merah, bawang putih, kentang, wortel) / <i>Tuberose vegetable cultivation (among others: onion, garlic, potato, carrot)</i>		<i>30% Foreign Capital Investment</i>
94.	Budidaya Sayuran Buah (antara lain: tomat, mentimun) / <i>Fruit vegetable cultivation (among others: tomato, cucumber)</i>	01133	Penanaman Modal Asing Maksimal 30% / <i>Maximum 30% Foreign Capital Investment</i>
95.	Budidaya Cabe, Paprika / <i>Chili, bell pepper cultivation</i>	01283	Penanaman Modal Asing Maksimal 30% / <i>Maximum 30% Foreign Capital Investment</i>
96.	Budidaya Jamur / <i>Mushroom cultivation</i>	01136	Penanaman Modal Asing Maksimal 30% / <i>Maximum 30% Foreign Capital Investment</i>
97.	Budidaya Tanaman Hias / <i>Ornamental plant cultivation</i>	01193	Penanaman Modal Asing Maksimal 30% / <i>Maximum 30% Foreign Capital Investment</i>
98.	Budidaya Tanaman Hias Non Bunga / <i>Non-flower ornamental plant cultivation</i>	01301	Penanaman Modal Asing Maksimal 30% / <i>Maximum 30% Foreign Capital Investment</i>
99.	Industri Pengolahan Hortikultura: Usaha Pasca Panen Buah dan Sayuran / <i>Horticulture processing industries: Fruits and vegetables post-harvest businesses</i>	10311 10320 10313 10314 10330	Penanaman Modal Asing Maksimal 30% / <i>Maximum 30% Foreign Capital Investment</i>
100.	Usaha Penelitian Hortikultura dan Usaha Laboratorium Uji Mutu Hortikultura / <i>Horticultural research businesses and horticulture quality control laboratory businesses</i>	72102	Penanaman Modal Asing Maksimal 30% / <i>Maximum 30% Foreign Capital Investment</i>
101.	Pengusahaan Wisata Agro Hortikultura / <i>Horticulture agro tourism businesses</i>	93231	Penanaman Modal Asing Maksimal 30% / <i>Maximum 30% Foreign Capital Investment</i>
102.	Usaha Jasa Pascapanen Hortikultura / <i>Post-harvest services businesses</i>	01630	Penanaman Modal Asing Maksimal 30% / <i>Maximum 30% Foreign Capital Investment</i>
103.	Usaha Perangkaian Bunga/Florist/Dekorator / <i>Flower arranging/florist/decorator businesses</i>	47761	Penanaman Modal Asing Maksimal 30% / <i>Maximum 30% Foreign Capital Investment</i>
104.	Konsultan Pengembangan Hortikultura / <i>Horticultural development consultants</i>	70209	Penanaman Modal Asing Maksimal 30% / <i>Maximum 30% Foreign Capital Investment</i>
105.	<i>Landscaping</i> Hortikultura / <i>Horticulture landscaping</i>	43305 71101 81300	Penanaman Modal Asing Maksimal 30% / <i>Maximum 30% Foreign Capital Investment</i>
106.	Jasa Kursus Hortikultura / <i>Horticulture course services</i>	85499	Penanaman Modal Asing Maksimal 30% / <i>Maximum 30% Foreign Capital Investment</i>
107.	Penelitian dan Pengembangan Ilmu Teknologi dan Rekayasa Sumber Daya Genetik Pertanian / <i>Technology and engineering research and development agricultural genetic resources</i>	72102	Penanaman Modal Asing Maksimal 49% / <i>Maximum 49% Foreign Capital Investment</i>
108.	Penelitian dan Pengembangan Ilmu	72104	Penanaman Modal Asing Maksimal 49% / <i>Maximum</i>

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

NO.	BIDANG USAHA <i>BUSINESS FIELD</i>	KBLI	PERSYARATAN <i>REQUIREMENTS</i>
	Teknologi dan Rekayasa Produk GMO (Rekayasa Genetika) / <i>Technology and engineering research and development of GMO (genetic engineering) Products</i>		<i>49% Foreign Capital Investment</i>
109.	Pembibitan dan Budidaya Babi dengan Jumlah Lebih dari 125 ekor / <i>Swine Breeding and Farming with a Quantity of more than 125</i>	01450	Lokasi Tertentu yang ditetapkan oleh Kementerian Pertanian / <i>Specific Locations determined by the Ministry of Agriculture</i>

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

B. Sektor Kehutanan / Forestry Sector

NO.	BIDANG USAHA <i>BUSINESS FIELD</i>	KBLI	PERSYARATAN <i>REQUIREMENTS</i>
110.	Pengusahaan Perburuan di Taman Buru dan Blok Buru / <i>Hunting businesses in Hunting Parks and Hunting Blocks</i>	93193 93229	Penanaman Modal Asing Maksimal 49% / <i>Maximum 49% Foreign Capital Investment</i>
111.	Penangkaran Satwa dan Tumbuhan Serta Lembaga Konservasi / <i>Animal and plant breeding as well as Conservation Institutions</i>	0172	Penanaman Modal Asing Maksimal 49% / <i>Maximum 49% Foreign Capital Investment</i>
112.	Pengusahaan Pariwisata Alam berupa Pengusahaan Sarana, Kegiatan dan Jasa Ekowisata di dalam Kawasan Hutan meliputi Wisata Tirta, Wisata Petualangan Alam, dan Wisata Gua / <i>Nature Tourism Businesses ie Facility Businesses, Activity and Ecotourism in Forest Areas Businesses, including Water tourism, Nature adventure tourism, cave tourism</i>	93241 93242 93243 93249 93223 93222	a. Penanaman Modal Asing Maksimal 51% / <i>Maximum 51% Foreign Capital Investment</i> b. Penanarnan Modal Asing Maksimal 70% bagi penanam modal dari Negara-negara ASEAN / <i>Maximum 70% of Foreign Capital Investment for Investors from ASEAN countries</i>
113.	Pengembangan Teknologi Pemanfaatan Genetik Tumbuhan dan Satwa Liar / <i>Development of Technology using plant and wildlife genetics</i>	72102	Pernyataan kerjasama dengan lembaga yang terakreditasi/ laboratorium di Indonesia/ lembaga nasional bidang litbang yang ditunjuk oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan / <i>Statement of partnership with an accredited institution/laboratorium in Indonesia/national institution in the field of research and development appointed by the Ministry of the Environment and Forestry</i>
114.	Industri Kayu Gergajian dengan Kapasitas Produksi di atas 2000 m ³ / tahun / <i>Saw Mill Industries with a production capacity above 2000M3/annum</i>)	16101	Rekomendasi pasokan bahan baku berkelanjutan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan / <i>Recommendation for the supply of raw materials from the Ministry of the Environment and Forestry</i>
115.	Industri Kayu Veneer / <i>Veneer industries</i>	16214	Rekomendasi pasokan bahan baku berkelanjutan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan / <i>Recommendation for the supply of raw materials from the Ministry of the Environment and Forestry</i>
116.	Industri Kayu Lapis / <i>Plywood industries</i>	16211	Rekomendasi pasokan bahan baku berkelanjutan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan / <i>Recommendation for the supply of raw materials from the Ministry of the Environment and Forestry</i>
117.	Industri Kayu Laminated Veneer Lumber (LVL) / <i>Laminated veneer lumber (LVL) Industries</i>	16212	Rekomendasi pasokan bahan baku berkelanjutan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan / <i>Recommendation for the supply of raw materials from the Ministry of the Environment and Forestry</i>

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

NO.	BIDANG USAHA <i>BUSINESS FIELD</i>	KBLI	PERSYARATAN <i>REQUIREMENTS</i>
118.	Industri Kayu Industri Serpih Kayu (wood chip) / Wood chip industries	16299	Rekomendasi pasokan bahan baku berkelanjutan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan / <i>Recommendation for the supply of raw materials from the Ministry of the Environment and Forestry</i>
119.	Industri Pelet Kayu (wood pellet) / <i>Wood pellet industries</i>	16295	Rekomendasi pasokan bahan baku berkelanjutan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan / <i>Recommendation for the supply of raw materials from the Ministry of the Environment and Forestry</i>
120.	Usaha Pemanfaatan hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam / <i>Utilization of Wood Forest products in Natural Forests</i>	02120	Modal dalam negeri 100% / <i>100% Domestic Capital Ownership</i>
121.	Pengadaan dan Peredaran Benih dan bibit Tanaman Hutan (ekspor dan impor benih dan bibit tanaman hutan) / <i>Procurement and Distribution of Forest Plant Seeds and Breeds (export and import of forest plants seeds and breeds)</i>	46207	Modal dalam negeri 100% / <i>100% Domestic Capital Ownership</i>
122.	Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan Air di Kawasan Hutan / Wild animal and plant breeding and coral breeding/cultivating out of conservation areas	02209	Modal dalam negeri 100% / <i>100% Domestic Capital Ownership</i>
123.	Penangkapan dan Peredaran Tumbuhan dan Satwa Liar (TSL) dari Habitat Alam / <i>Catching and Propagating Plants and Wildlife (TSL) from Natural Habitats except reptiles (snakes, lizards, turtles, soft shell turtles and crocodiles)</i>	01711 01712 01713 01714 01715	a. Modal dalam negeri 100% / <i>100% Domestic Capital Ownership</i> b. Rekomendasi dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan / <i>Recommendation from the Ministry of the Environment and Forestry</i>

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

C. Sektor Kelautan dan Perikanan / *Marine and Fisheries Sector*

NO.	BIDANG USAHA <i>BUSINESS FIELD</i>	KBLI	PERSYARATAN <i>REQUIREMENTS</i>
124.	Perikanan Tangkap dengan Menggunakan Kapal Penangkap Ikan di Wilayah Pelayaran Indonesia dan Laut Lepas / <i>Fishing Using Fishing Vessels in Indonesian Waters and the High Seas</i>	03111	Modal dalam negeri 100% dan Izin Khusus dari Kementerian Kelautan dan Perikanan mengenai alokasi sumber daya ikan dan titik koordinat daerah penangkapan ikan / <i>100% Local Capital Investment and a Special License from the Ministry of Marine and Fisheries regarding the allocation of fishery resources and coordinates of the fishing area</i>
125.	Penggalian Pasir Laut / <i>Excavation of sea sand</i>	08995	Modal dalam negeri 100% / <i>100% Domestic Capital Ownership</i>
126.	Budidaya Koral / Karang Hias / <i>Cultivation of Corals/Decorative Reefs</i>	01727	Rekomendasi dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan / <i>Recommendation from the Ministry of the Environment and Forestry</i>

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

D. Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral / *Energy and Mineral Resources Sector*

NO.	BIDANG USAHA <i>BUSINESS FIELDS</i>	KBLI	PERSYARATAN <i>REQUIREMENTS</i>
127.	Jasa Konstruksi Migas: Platform / <i>Oil and gas construction services: Platforms</i>	09100	Penanaman Modal Asing Maksimal 75% / <i>Maximum 75% Foreign Capital Investment</i>
128.	Jasa Konstruksi Migas: Tangki Spherical / <i>Oil and gas construction services: Spherical tanks</i>	09100	Penanaman Modal Asing Maksimal 49% / <i>Maximum 49% Foreign Capital Investment</i>
129.	Jasa Konstruksi Migas: Instalasi Produksi Hulu Minyak dan Gas Bumi di Darat / <i>Oil and gas construction services: on shore oil and gas upstream production Installations</i>	09100	Modal dalam negeri 100% / <i>100% Domestic Capital Ownership</i>
130.	Jasa Konstruksi Migas: Instalasi Pipa Penyalur di Darat / <i>Oil and gas construction services: on shore distribution pipe Installation</i>	42219	Modal dalam negeri 100% / <i>100% Domestic Capital Ownership</i>
131.	Jasa Konstruksi Migas: Instalasi Pipa Penyalur di Laut / <i>Oil and gas construction services: Installation of distribution pipes in the sea</i>	42219	Penanaman Modal Asing Maksimal 49% / <i>Maximum of 49% Foreign Capital Investment</i>
132.	Jasa Konstruksi Migas: Tangki Horisontal/Vertikal, Instalasi Penyimpanan, dan Pemasaran Minyak dan Gas Bumi di Darat / <i>Oil and gas construction services: Horizontal/vertical tanks, oil and gas storage Installation and marketing on shore</i>	42914	Modal dalam negeri 100% / <i>100% Domestic Capital Ownership</i>
133.	Jasa Survei Migas, Geologi, dan Geofisika / <i>Survey services: Oil and gas</i>	71102	Penanaman Modal Asing Maksimal 49% / <i>Maximum 49% Foreign Capital Investment</i>
134.	Jasa Survei Panas Bumi / <i>Survey services: Geothermal</i>	71102	Penanaman Modal Asing Maksimal 95% / <i>Maximum 95% Foreign Capital Investment</i>
135.	Jasa Pemboran Migas di Darat / <i>Drilling services: Oil and gas on shore</i>	09100	Modal dalam negeri 100% / <i>100% Domestic Capital Ownership</i>
136.	Jasa Pemboran Migas di Laut / <i>Drilling services: Oil and gas in the sea</i>	09100	Penanaman Modal Asing Maksimal 75% / <i>Maximum 75% Foreign Capital Investment</i>
137.	Jasa Pemboran Panas Bumi / <i>Drilling services: Geothermal</i>	06202	Penanaman Modal Asing Maksimal 95% / <i>Maximum 95% Foreign Capital Investment</i>
138.	Jasa Penunjang Migas: Jasa Operasi Sumur dan Pemeliharaan / <i>Oil and gas support services: Well operation and maintenance services</i>	09100	Modal dalam negeri 100% / <i>100% Domestic Capital Ownership</i>
139.	Jasa Penunjang Migas: Jasa Desain dan Engineering Migas / <i>Oil and gas support services: oil and gas Design and Engineering services</i>	71102	Modal dalam negeri 100% / <i>100% Domestic Capital Ownership</i>
140.	Jasa Penunjang Migas: Jasa Inspeksi Teknis / <i>Oil and gas support services: Technical inspection services</i>	71204	Modal dalam negeri 100% / <i>100% Domestic Capital Ownership</i>
141.	Jasa Pengoperasian dan Pemeliharaan Panas Bumi / <i>Geothermal operation and maintenance services</i>	06202	Penanaman Modal Asing Maksimal 90% / <i>Maximum 90% Foreign Capital Investment</i>
142.	Pembangkit Listrik < 1 MW / <i>Power plants</i>	35101	Modal dalam negeri 100% / <i>100% Domestic Capital Ownership</i>

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

NO.	BIDANG USAHA <i>BUSINESS FIELDS</i>	KBLI	PERSYARATAN <i>REQUIREMENTS</i>
	< 1 MW		<i>Ownership</i>
143.	Pembangkit Listrik Skala Kecil (I - 10 MW) / <i>Small-scale power plants (1 – 10 MW)</i>	35101	Penanaman Modal Asing Maksimal 49% / <i>Maximum 49% Foreign Capital Investment</i>
144.	Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi dengan Kapasitas s 10 MW / <i>Geothermal Power Plants with a capacity of ≤ 10 MW</i>	35101	Penanaman Modal Asing Maksimal 67% / <i>Maximum 67% Foreign Capital Investment</i>
145.	Pembangkit Listrik > 10 MW / <i>Power plants > 10 MW</i>	35101	Penanaman Modal Asing Maksimal 95% (Maksimal 100% apabila dalam rangka Kerjasama Pemerintah Swasta/KPS selama masa konsesi) / <i>Maximum of 95% Foreign Capital Investment (Maximum 100% if a Public Private Partnership during the concession)</i>
146.	Transmisi Tenaga Listrik / <i>Power Plant Transmission</i>	35102	Penanaman Modal Asing Maksimal 95% (Maksimal 100% apabila dalam rangka Kerjasama Pemerintah Swasta/KPS selama masa konsesi) / <i>Maximum 95% Foreign Capital Investment (Maximum of 100% if a Public Private Partnership during the concession)</i>
147.	Distribusi Tenaga Listrik / <i>Electric Power Distribution</i>	35103	Penanaman Modal Asing Maksimal 95% (Maksimal 100% apabila dalam rangka Kerjasama Pemerintah Swasta/KPS selama masa konsesi) / <i>Maximum 95% Foreign Capital Investment (Maximum of 100% if in the event of Public Private Partnerships during concession)</i>
148.	Konsultasi di Bidang Instalasi Tenaga Listrik / <i>Electric Power Consultancy Services</i>	71102	Penanaman Modal Asing Maksimal 95% / <i>Maximum 95% Foreign Capital Investment</i>
149.	Pembangunan dan Pemasangan Instalasi Tenaga Listrik atas Instalasi Penyediaan Tenaga Listrik / <i>Development and installation of power plants for of Power Provider Installations</i>	42213	Penanaman Modal Asing Maksimal 95% / <i>Maximum 95% Foreign Capital Investment</i>
150.	Pembangunan dan Pemasangan Instalasi Tenaga Listrik atas Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik Tegangan Tinggi / Ekstra Tinggi / <i>Development and Installation of Power Plant Installations for High/Extra High Voltage Electric Power Installations</i>	43211	Penanaman Modal Asing Maksimal 49% / <i>Maximum 49% Foreign Capital Investment</i>
151.	Pembangunan dan Pemasangan Instalasi Tenaga Listrik atas Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik: Tegangan Rendah/Menengah / <i>Development and Installation of Power Plant Installations for Low/Medium Voltage Power Plant Installations</i>	43211	Modal dalam negeri 100% / <i>100% Domestic Capital Ownership</i>
152.	Pengoperasian dan Pemeliharaan Instalasi Tenaga Listrik / <i>Operation and maintenance of of Electric Power Installations</i>	43211	Penanaman Modal Asing Maksimal 95% / <i>Maximum 95% Foreign Capital Investment</i>
153.	Pemeriksaan dan Pengujian Instalasi Tenaga Listrik atas Instalasi Penyediaap. Tenaga Listrik atau Pemanfaatan Tenaga Listrik Tegangan Tinggi/ Ekstra Tinggi /	71204	Penanaman Modal Asing Maksimal 49% / <i>Maximum 49% Foreign Capital Investment</i>

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

NO.	BIDANG USAHA <i>BUSINESS FIELDS</i>	KBLI	PERSYARATAN <i>REQUIREMENTS</i>
	<i>Inspection and Testing of Electric Power Installations Providing Electric Power or the Utilization of High Voltage/Extra High Voltage Electric Power</i>		
154.	Pemeriksaan dan Pengujian Instalasi Tenaga Listrik atas Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik Tegangan Rendah/ Menengah / <i>Inspection and Testing of Electric Power Installations for Electric Power Production Installations or the Utilization of Low/Medium Voltage Electric Power</i>	71204	Modal dalam negeri 100% / <i>100% Domestic Capital Ownership</i>

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

E. Sektor Perindustrian / *Industry Sector*

NO.	BIDANG USAHA <i>BUSINESS FIELD</i>	KBLI	PERSYARATAN <i>REQUIREMENTS</i>
155.	Pemeliharaan dan Reparasi Mobil / <i>Car Maintenance and Repair</i>	45201	Penanaman Modal Asing Maksimal 49% / <i>Maximum 49% Foreign Capital Investment</i>
156.	Industri Rokok Kretek / <i>Kretek Cigarette Industries</i>	12011	Rekomendasi dari Kementerian Perindustrian / <i>a recommendation from the Ministry of Industry</i> : a. Untuk perluasan usaha, hanya industri rokok yang telah memiliki Izin Usaha Industri (IUI) pada bidang usaha sejenis; atau / <i>A business expansion only into a cigarette industry that already has an Industrial Business License (IUI) for a similar business field; or</i> b. Untuk penanaman modal baru, hanya industri rokok skala kecil dan menengah yang bermitra dengan industri rokok skala besar yang sudah memiliki IUI pada bidang usaha sejenis / <i>a new investment only in a small to medium-scale cigarette industry that partners with a large-scale industry that already has an IUI for a similar business field</i>
157.	Industri Rokok Putih / <i>White Cigarette Industries</i>	12012	Rekomendasi dari Kementerian Perindustrian / <i>a recommendation from the Ministry of Industry</i> : a. Untuk perluasan usaha, hanya industri rokok yang telah memiliki Izin Usaha Industri (IUI) pada bidang usaha sejenis; atau / <i>a business expansion only in a cigarette industry that already has an Industrial Business License (IUI) for a similar business field; or</i> b. Untuk penanaman modal baru, hanya industri rokok skala kecil dan menengah yang bermitra dengan industri rokok skala besar yang sudah memiliki IUI pada bidang usaha sejenis / <i>a new investment only in a small to medium-scale cigarette industry that partners with a large-scale industry that already has an IUI for a similar business field</i>
158.	Industri Rokok Lainnya / <i>Other Cigarette Industries</i>	12019	b. Untuk penanaman modal baru, hanya industri rokok skala kecil dan menengah yang bermitra dengan industri rokok skala besar yang sudah memiliki IUI pada bidang usaha sejenis / <i>a new investment only in a small to medium-scale cigarette industry that partners with a large-scale industry that already has an IUI for a similar business field</i>
159.	Industri Bubur Kertas Pulp (dari kayu) / <i>Pulp (from wood) Industries</i>	17011	Bahan baku dari Butan Tanaman Industri (HTI) atau berasal dari Chip Impor jika bahan baku dalam negeri tidak mencukupi / <i>Raw materials from Industrial Forest Plants (HTI) or from imported chips, if domestic raw materials are insufficient</i>
160.	Industri Kertas Berharga (antara lain: bank notes paper, cheque. paper, watermark paper) / <i>Valuable Paper Industries (among others: Bank Note Paper, Cheque Paper, Watermark Paper)</i>	17013	a. Izin operasional dari BOTASUPAL/BINI; dan / <i>an Operating license from BOTASUPAL/BIN; and</i> b. Rekomendasi dari kementerian Perindustrian / <i>a recommendation from the Ministry of Industry</i>

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

NO.	BIDANG USAHA <i>BUSINESS FIELD</i>	KBLI	PERSYARATAN <i>REQUIREMENTS</i>
161.	Industri Percetakan Uang dan Industri Percetakan Khusus/ Dokumen Sekuriti (antara lain: perangko, materai, surat berharga, paspor. Dokumen kependudukan dan hologram) / Money Printing Industries and Special Printing/Security Document Printing Industries (among others: stamps, duty stamps, securities bonds, passports, demography documents and holograms)	181112	a. Izin operasional dari BOTASUPAL/BIN; dan / an <i>Operating license from BOTASUPAL/BIN; and</i> b. Rekomendasi dari kementerian Perindustrian / a <i>recommendation from the Ministry of Industry</i>
162.	Industri Siklamat dan Sakarin / <i>Cyclamate and Saccharin Industries</i>	20119	Sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan BPOM dan Kementerian Perdagangan / <i>according to the provisions issued by BPOM and the Ministry of Trade</i>
163.	Industri Tinta Khusus / <i>Special Ink Industries</i>	20293	a. Izin operasional dari BOTASUPAL/BIN; dan / an <i>Operating license from BOTASUPAL/BIN; and</i> b. Rekomendasi dari kementerian Perindustrian / a <i>recommendation from the Ministry of Industry</i>
164.	Industri Peleburan Timah Hitam / <i>Lead Smelting Industries</i>	24202	Rekomendasi dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Perindustrian khusus untuk industri yang menggunakan bahan baku accu bekas / a <i>recommendation from the Ministry of the Environment and the Ministry of Industry especially for an industry using used batteries</i>
165.	Industri Crumb Rubber / <i>Crumb Rubber Industries</i>	22123	Izin khusus dari Menteri Perindustrian dengan ketentuan terpadu dengan pengembangan perkebunan karet: / a <i>Special License from the Ministry of Industry provided that the industry is integrated with rubber plantation development:</i> a. pemenuhan kebutuhan bahan baku paling kurang 20% dari kapasitas produksi berasal dari kebun karet sendiri; dan / <i>meet at least 10% of the need for raw materials, at least 20% from own rubber plantations; and</i> b. Pemenuhan kebutuhan bahan baku paling banyak 80% dengan pola kemitraan dengan paling sedikit dari Luas kebun 20% merupakan kebun plasma / <i>meet up to 80% of the need for raw materials in a partnership scheme with at least 20% of the plantation area being a plasma plantation</i>

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

F. Sektor Pertahanan dan Keamanan / *Defense and Security Sector*

NO.	BIDANG USAHA <i>BUSINESS FIELDS</i>	KBLI	PERSYARATAN <i>REQUIREMENTS</i>
166.	Raw Materials for Explosives Industries / <i>Bahan Baku Untuk Bahan Peledak Industri</i>	20114	a. Penanaman Modal Asing Maksimal 49%, dengan 51% untuk BUMN / <i>Max. Foreign Capital Investment 49%, with 51% for State-Owned Enterprises (BUMN)</i> b. Rekomendasi dari Kementerian Pertahanan / <i>a Recommendation from the Ministry of Defense</i>
167.	Main Component and/or Support Industries / <i>Industri Komponen Utama dan/atau Penunjang</i>	20292	a. Penanaman Modal Asing Maksimal 49%, dengan 51% untuk BUMN / <i>Max. Foreign Capital Investment 49%, with 51% for State-Owned Enterprises (BUMN)</i> b. Rekomendasi dari Kementerian Pertahanan / <i>a Recommendation from the Ministry of Defense</i>
168.	Industri Komponen dan / atau Pendukung (Perbekalan) / <i>Component and/or Support Industries (Supply)</i>	20292	a. Penanaman Modal Asing Maksimal 49%, dengan 51% untuk BUMN / <i>Max. Foreign Capital Investment 49%, with 51% for State-Owned Enterprises (BUMN)</i> b. Rekomendasi dari Kementerian Pertahanan / <i>a Recommendation from the Ministry of Defense</i>
169.	Industri Alat Utama / <i>Main Equipment Industries</i>	25200 25934 30300 30400	a. Modal dalam negeri 100% / <i>100% Domestic Capital Ownership</i> b. Rekomendasi dari Kementerian Pertahanan / <i>a Recommendation from the Ministry of Defense</i>
170.	Jasa Konsultasi Keamanan / <i>Security Consultancy Services</i>	74909	a. Penanaman Modal Asing Maksimal 49% / <i>Max. Foreign Capital Investment 49%</i> b. Izin Operasional dari Mabes Polri / <i>an Operating License from National Police Headquarters</i>
171.	Jasa Penyediaan Tenaga Keamanan. Kawal Angkut Uang dan Barang Berharga. Penyediaan Jasa Keamanan Menggunakan Hewan/Satwa / <i>Providing Security Guards, Money and Valuable Goods Transportation Guards, Security Service Using Animals</i>	80100	a. Penanaman Modal Asing Maksimal 49% / <i>Max. Foreign Capital Investment 49%</i> b. Izin Operasional dari Mabes Polri / <i>an Operating License from National Police Headquarters</i>
172.	Jasa Penerapan Peralatan Keamanan / <i>Security Equipment Application Services</i>	80200	a. Penanaman Modal Asing Maksimal 49% / <i>Max. Foreign Capital Investment 49%</i> b. Izin Operasional dari Mabes Polri / <i>an Operating License from National Police Headquarters</i>
173.	Jasa Pendidikan dan Latihan Keamanan / <i>Security Education and Training Services</i>	85499	a. Penanaman Modal Asing Maksimal 49% / <i>Max. Foreign Capital Investment 49%</i> b. Izin Operasional dari Mabes Polri / <i>an Operating License from National Police Headquarters</i>

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

G. Sektor Pekerjaan Umum / *Public Works Sector*

NO.	BIDANG USAHA <i>BUSINESS FIELD</i>	KBLI	PERSYARATAN <i>REQUIREMENTS</i>
174.	Jasa Kontruksi (Jasa Pelaksana Konstruksi) yang Menggunakan Teknologi Tinggi dan/atau Risiko Tinggi dan/atau Nihil Pekerjaan lebih dari Rp 50.000.000.000,00 (CPC511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, dan 518) / <i>Construction Services (Construction Contractors) with Advanced Technology and/or High Risk and/or a Work Value of more than IDR 50,000,000,000.00 (CPC 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, and 518)</i>	00000	a. Penanaman Modal Asing Maksimal 67% / <i>Max. Foreign Capital Investment 67%</i> b. Maksimal 70% bagi penanam modal dari negara-negara ASEAN / <i>Max. Investment 70% for Investors from ASEAN countries</i>
175.	Jasa Bisnis/Jasa Konsultasi Konstruksi yang Menggunakan Teknologi Tinggi dan/atau Risiko Tinggi dan/atau Nilai Pekerjaan lebih dan Rp 10.000.000.000,00 (CPC8671, 8672, 8673, 8674, dan 9403) / <i>Consultancy Services/Business Services for Construction with Advanced Technology and/or High Risk and/or a Work Value of more than IDR 50,000,000,000.00 (CPC 8671, 8672, 8673, 8674, and 9403)</i>	00000	a. Penanaman Modal Asing Maksimal 67% / <i>Max. Foreign Capital Investment 67%</i> b. Maksimal 70% bagi penanam modal dari negara-negara ASEAN / <i>Max. Investment 70% for Investors from ASEAN countries</i>
176.	Pengusahaan Air Minum / <i>Drinking Water Businesses</i>	36001	Penanaman Modal Asing Maksimal 95% / <i>Max. Foreign Capital Investment 95%</i>

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

H. Sektor Perdagangan / Trading Sector

NO.	BIDANG USAHA <i>BUSINESS FIELD</i>	KBLI	PERSYARATAN <i>REQUIREMENTS</i>
177.	Perdagangan Eceran Mobil, Sepeda Motor, dan Kendaraan Niaga / <i>Car, Motorcycle, and Commercial Vehicle Retail Trading</i>	45103 45104 45403 45404	Modal dalam negeri 100% / <i>100% Domestic Capital Ownership</i>
178.	Retail Trading in Spare-Parts and Accessories for Cars, Motorcycles, and Commercial Vehicles / Perdagangan Eceran Suku Cadang dan Aksesoris Mobil. Sepeda Motor, dan Kendaraan Niaga	45302 45406	Modal dalam negeri 100% / <i>100% Domestic Capital Ownership</i>
179.	Supermarket dengan Luas Lantai Penjualan Kurang dari 1.200 m ² / <i>Supermarkets with a Sales Floor Area of less than 1,200m²</i>	47111	Modal dalam negeri 100% / <i>100% Domestic Capital Ownership</i>
180.	Minimarket dengan Luas Lantai Penjualan Kurang dari 400 m ² Termasuk Convenience Store dan Community Store / <i>Minimarkets with a Sales Floor Area of less than 400m², Including Convenience Stores and Community Stores</i>	47111	Modal dalam negeri 100% / <i>100% Domestic Capital Ownership</i>
181.	Departement Store dengan Luas Lantai Penjualan 400 m ² - 2,000 m ² / <i>Department Stores with a Sales Floor Area of 400m² – 2,000m²</i>	47191	a. Penanaman Modal Asing Maksimal 67%; dan / <i>Max. Foreign Capital Investment 67%; and</i> b. Izin Khusus dari Kementerian Perdagangan dengan persyaratan: / <i>a Special License from the Ministry of Trade with the following requirements:</i> 1. Bertempat di dalam mal dan tidak stand alone / <i>Located in a mall and does not stand alone;</i> 2. Penambahan outlet store berdasarkan ekspor performance / <i>an Addition to an outlet store based on export performance</i>
182.	Perdagangan Eceran Barang Perhiasan / <i>Jewelry Retail Trading</i>	47735	Modal dalam negeri 100% / <i>100% Domestic Capital Ownership</i>
183.	Perdagangan Eceran Barang Antik / <i>Antique Goods Retail Trading</i>	47746	Modal dalam negeri 100% / <i>100% Domestic Capital Ownership</i>
184.	Perdagangan Eceran Alat Transportasi Air dan Perlengkapannya / <i>Water Transportation and Equipment Retail Trading</i>	47795	Modal dalam negeri 100% / <i>100% Domestic Capital Ownership</i>
185.	Perdagangan Eceran Bukan di Supermarket atau Minimarket / <i>Retail Trading not in a Supermarket or Minimarket</i>	47112	Modal dalam negeri 100% / <i>100% Domestic Capital Ownership</i>
186.	Retail Perdagangan Eceran Bukan di Toserba / <i>Departement Store Trading not in A Department Store</i>	47192	Modal dalam negeri 100% / <i>100% Domestic Capital Ownership</i>
187.	Perdagangan Eceran Tekstil / <i>Textile Goods Retail Trading</i>	47511 47512	Modal dalam negeri 100% / <i>100% Domestic Capital Ownership</i>
188.	Perdagangan Eceran Khusus Alat Permainan dan Mainan Anak di Toko / <i>Special Retail Trading in Children's Games and Toys in a Store</i>	47640	Modal dalam negeri 100% / <i>100% Domestic Capital Ownership</i>
189.	Perdagangan Eceran Kosmetik / <i>Cosmetics Retail Trading</i>	47725	Modal dalam negeri 100% / <i>100% Domestic Capital Ownership</i>

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

NO.	BIDANG USAHA <i>BUSINESS FIELD</i>	KBLI	PERSYARATAN <i>REQUIREMENTS</i>
190.	Perdagangan Eceran Alas Kaki / <i>Footwear Retail Trading</i>	47712	Modal dalam negeri 100% / <i>100% Domestic Capital Ownership</i>
191.	Perdagangan Eceran Elektronik / <i>Electronic Goods Retail Trade</i>	47861	Modal dalam negeri 100% / <i>100% Domestic Capital Ownership</i>
192.	Perdagangan Eceran Makanan dan Minuman / <i>Food and Beverages Retail Trading</i>	4722 4724	Modal dalam negeri 100% / <i>100% Domestic Capital Ownership</i>
193.	Perdagangan Eceran Melalui Sistem Elektronik Untuk Berbagai Barang Lainnya (Misalnya: Minuman Beralkohol) / <i>Retail Trading through Electronic Systems of Various Other Goods (Example: Alcoholic Beverages)</i>	47919	Modal dalam negeri 100% / <i>100% Domestic Capital Ownership</i>
194.	Jasa Keagenan / <i>Commission Agent</i>	46100	Modal dalam negeri 100% / <i>100% Domestic Capital Ownership</i>
195.	Real Estate Broker Properti / Real Estate / <i>Real Estate Broker / Broker Property</i>	68200	Modal dalam negeri 100% / <i>100% Domestic Capital Ownership</i>
196.	Perdagangan Distributor yang Tidak Terafiliasi dengan Produksi / <i>Trade Distributor not Affiliated with Production</i>	00000	Penanaman Modal Asing Maksimal 67% / <i>Max. Foreign Capital Investment 67%</i>
197.	Pergudangan / <i>Warehouses</i>	52101	Penanaman Modal Asing Maksimal 67% / <i>Max. Foreign Capital Investment 67%</i>
198.	Jasa Survei Keadaan Barang Muatan (Cargo Condition Survey) / <i>Cargo Condition Survey Services</i>	00000	Modal dalam negeri 100% / <i>100% Domestic Capital Ownership</i>
199.	Jasa Survei Sarana Angkutan Darat, laut, dan Udara Beserta Kelengkapannya / <i>Land, Sea and Air Transportation Facilities and their Completeness Survey Services</i>	00000	Modal dalam negeri 100% / <i>100% Domestic Capital Ownership</i>
200.	Jasa Survei Sarana Keteknikan dan Industri Termasuk. Rekayasa teknik (Technical and. Industry Survey) / <i>Technical and Industrial Facilities, Including Engineering Survey Services</i>	00000	Modal dalam negeri 100% / <i>100% Domestic Capital Ownership</i>
201.	Jasa Survei Lingkungan Hidup (Ecological Survey) / <i>Ecological Survey Services</i>	00000	Modal dalam negeri 100% / <i>100% Domestic Capital Ownership</i>
202.	Jasa Survei Terhadap Obyek-Obyek Pembiayaan atau Pengawasan Persediaan Barang dan Pergudangan (warehousing Supervision) / <i>Financing Objects and Supervision of Stock and Warehousing Survey Services</i>	00000	Modal dalam negeri 100% / <i>100% Domestic Capital Ownership</i>
203.	Jasa Survei dengan atau Tanpa Merusak Obyek (<i>Destructive / Nondestructive Testing</i>) / <i>Survey Services with or without Destructive / Non-destructive Testing</i>	00000	Modal dalam negeri 100% / <i>100% Domestic Capital Ownership</i>
204.	Jasa Survei Kuantitas (Quantity Survey) / <i>Quantity Survey Services</i>	00000	Modal dalam negeri 100% / <i>100% Domestic Capital Ownership</i>
205.	Jasa Survei Kualitas (Quality Survey) / <i>Quality Survey Services</i>	00000	Modal dalam negeri 100% / <i>100% Domestic Capital Ownership</i>

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

NO.	BIDANG USAHA <i>BUSINESS FIELD</i>	KBLI	PERSYARATAN <i>REQUIREMENTS</i>
206.	Jasa Survei Pengawasan (Supervision Survey) atas Suatu Proses Kegiatan Sesuai Standar yang Berlaku acau yang Disepakati / <i>Supervision of a Process in an Activity based on Prevailing or Agreed Standards Survey Services</i>	00000	Modal dalam negeri 100% / <i>100% Domestic Capital Ownership</i>
207.	Jasa Survei/Jajak Pendapat Masyarakat dan Penelitian Pasar / <i>Public Opinion Polling and Market Research Services</i>	73200	a. Modal dalam negeri 100% / <i>100% Domestic Capital Ownership</i> b. Maksimal 70% bagi penanaman modal / <i>Max. Investment 70% for Investors from ASEAN countries</i>
208.	Persewaan Alat Transportasi Darat (Rental Without Operator) / <i>Land Transportation Rental Without an Operator</i>	77100	Modal dalam negeri 100% / <i>100% Domestic Capital Ownership</i>
209.	Persewaan Mesin Perlanian dan Peralatannya / <i>Rental of Agricultural Machinery and Equipment</i>	77305	Modal dalam negeri 100% / <i>100% Domestic Capital Ownership</i>
210.	Persewaan Mesin Konstruksi dan Teknik Sipil dan Peralatannya / <i>Rental of Construction and Civil Engineering Machinery and Equipment</i>	77306	Modal dalam negeri 100% / <i>100% Domestic Capital Ownership</i>
211.	Persewaan Mesin Kantor dan Peralatannya (termasuk komputer) / <i>Rental of Office Machinery and Equipment (Including Computers)</i>	77307	Modal dalam negeri 100% / <i>100% Domestic Capital Ownership</i>
212.	Persewaan Mesin Lainnya dan Peralatannya yang Tidak Diklasifikasikan di Tempat Lain (pembangkit tenaga listrik, tekstil, pengolahan, pengerjaan Logam kayu, percetakan, dan las listrik) / <i>Rental of Other Machinery and Equipment not Classified Elsewhere (Power Plant, Textiles, Metal/Wood Processing/Workmanship, Printing, and Electric Welding)</i>	77309	Modal dalam negeri 100% / <i>100% Domestic Capital Ownership</i>
213.	Jasa Kebersihan Gedung / <i>Building Cleaning Services</i>	81210	Modal dalam negeri 100% / <i>100% Domestic Capital Ownership</i>
214.	Jasa Binatu / <i>Laundry Services</i>	96200	Modal dalam negeri 100% / <i>100% Domestic Capital Ownership</i>
215.	Pangkas Rambut / <i>Barber Shops</i>	96111	Modal dalam negeri 100% / <i>100% Domestic Capital Ownership</i>
216.	Salon Kecantikan / <i>Beauty Salons</i>	96112	Modal dalam negeri 100% / <i>100% Domestic Capital Ownership</i>
217.	Penjahit / <i>Tailors</i>	96991	Modal dalam negeri 100% / <i>100% Domestic Capital Ownership</i>
218.	Jasa Foto Kopi, Penyiapan Dokumen, dan Jasa Khusus Penunjang Kantor Lainnya / <i>Photocopying, Document Preparation and Other Specialized Office Support Services</i>	82190	Modal dalam negeri 100% / <i>100% Domestic Capital Ownership</i>
219.	Perdagangan Besar Minuman Keras Beralkohol (importir, distributor, dan subdistributor) / <i>Large Quantity Trading of Liquor/Alcoholic Beverages (Importers, Distributors and Sub-Distributors)</i>	46333	Memiliki / <i>Owned</i> : a. Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB) / <i>Alcoholic Beverages Trading Business License (SIUP-MB)</i> b. Jaringan distribusi dan tempatnya khusus / <i>Distribution network and specially a designated place</i>

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

NO.	BIDANG USAHA <i>BUSINESS FIELD</i>	KBLI	PERSYARATAN <i>REQUIREMENTS</i>
220.	Perdagangan Eceran Minuman Keras/Beralkohol / <i>Large Quantity Trading of Liquor/Alcoholic Beverages</i>	47221	Memiliki / <i>Owned</i> : a. Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB) / <i>Alcoholic Beverages Trading Business License (SIUP-MB)</i> b. Jaringan distribusi dan tempatnya khusus / <i>Distribution network and a specially designated place</i>
221.	Perdagangan Eceran Kaki Lima Minuman Keras / Beralkohol / <i>Liquor/Alcoholic Beverages Retail Side Walk Vendor Trading</i>	47826	Memiliki / <i>Owned</i> : a. Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB) / <i>Alcoholic Beverages Trading Business License (SIUP-MB)</i> b. Jaringan distribusi dan tempatnya khusus / <i>Distribution network and a specially designated place</i>
222.	Penyelenggaraan Sistem Perdagangan Alternatif / <i>Organizing Alternative Trading Systems</i>	00000	Modal dalam negeri 100% / <i>100% Domestic Capital Ownership</i>
223.	Peserta Sistem Perdagangan Alternatif / <i>Participating in Alternative Trading Systems</i>	00000	Modal dalam negeri 100% / <i>100% Domestic Capital Ownership</i>

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

I. Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif / *Tourism and the Creative Economy Sector*

NO.	BIDANG USAHA <i>BUSINESS FIELD</i>	KBLI	PERSYARATAN <i>REQUIREMENTS</i>
224.	Pengelolaan Museum / <i>Museum Management</i> (CPC 96321)	91022	a. Penanaman Modal Asing Maksimal 67% / <i>Max. Foreign Capital Investment 67%</i> b. Maksimal 70% bagi penanam modal dari Negara – Negara ASEAN / <i>Max. Investment 70% for Investors from ASEAN countries</i>
225.	Pengelolaan Peninggalan Sejarah dan Purbakala Berupa candi Keraton Prasasti, Petilasan, dan Bangunan Kuno / <i>Management of Historical and Ancient Sites Including Temples, Palaces, Inscriptions (Prasasti), Ruins and Ancient Buildings</i>	91024	Penanaman Modal Asing Maksimal 67% / <i>Max. Foreign Capital Investment 67%</i>
226.	Biro Perjalanan Wisata / <i>Tourism Travel Bureaus</i> (CPC 7471)	79120	a. Penanaman Modal Asing Maksimal 67% / <i>Max. Foreign Capital Investment 67%</i> b. Maksimal 70% bagi penanam modal dari Negara – Negara ASEAN / <i>Max. Investment 70% for Investors from ASEAN countries</i>
227.	Jasa Boga / <i>Catering</i>	56210	a. Penanaman Modal Asing Maksimal 67% / <i>Max. Foreign Capital Investment 67%</i> b. Maksimal 70% bagi penanam modal dari Negara – Negara ASEAN / <i>Max. Investment 70% for Investors from ASEAN countries</i>
228.	Hotel Bintang Dua / <i>Two-Star Hotels</i>	55114	Penanaman Modal Asing Maksimal 67% / <i>Max. Foreign Capital Investment 67%</i>
229.	One-Star Hotel / One-Star <i>Hotels</i>	55115	Penanaman Modal Asing Maksimal 67% / <i>Max. Foreign Capital Investment 67%</i>
230.	Hotel Non Bintang / <i>Non-Star Hotels</i>	55120	Penanaman Modal Asing Maksimal 67% / <i>Max. Foreign Capital Investment 67%</i>
231.	Motel / <i>Motels</i>	55199	a. Penanaman Modal Asing Maksimal 67% / <i>Max. Foreign Capital Investment 67%</i> b. Maksimal 70% bagi penanam modal dari Negara – Negara ASEAN / <i>Max. Investment 70% for Investors from ASEAN countries</i>
232.	Rumah Biliar / <i>Pool Halls</i> (CPC 964)	93111	a. Penanaman Modal Asing Maksimal 67% / <i>Max. Foreign Capital Investment 67%</i> b. Maksimal 70% bagi penanam modal dari Negara – Negara ASEAN / <i>Max. Investment 70% for Investors from ASEAN countries</i>

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

NO.	BIDANG USAHA <i>BUSINESS FIELD</i>	KBLI	PERSYARATAN <i>REQUIREMENTS</i>
233.	Gelanggang Bowling / <i>Bowling Alleys</i> (CPC 964)	93113	a. Penanaman Modal Asing Maksimal 67% / <i>Max. Foreign Capital Investment 67%</i> b. Maksimal 70% bagi penanam modal dari Negara – Negara ASEAN / <i>Max. Investment 70% for Investors from ASEAN countries</i>
234.	Lapangan Golf / <i>Golf Courses</i> (CPC 96413)	93112	a. Penanaman Modal Asing Maksimal 67% / <i>Max. Foreign Capital Investment 67%</i> b. Maksimal 70% bagi penanam modal dari Negara – Negara ASEAN / <i>Max. Investment 70% for Investors from ASEAN countries</i>
235.	Galeri Seni / <i>Art Galleries</i>	90006	Penanaman Modal Asing Maksimal 67% / <i>Max. Foreign Capital Investment 67%</i>
236.	Gedung Pertunjukan Seni / <i>Artistic Performance Buildings</i>	90006	Penanaman Modal Asing Maksimal 67% / <i>Max. Foreign Capital Investment 67%</i>
237.	Jasa Impresariat / <i>Art Impresario Services</i> (CPC 96191)	90004	a. Penanaman Modal Asing Maksimal 67% / <i>Max. Foreign Capital Investment 67%</i> b. Maksimal 70% bagi penanam modal dari Negara – Negara ASEAN / <i>Max. Investment 70% for Investors from ASEAN countries</i>
238.	Karaoke / <i>Singing Rooms</i>	93292	Penanaman Modal Asing Maksimal 67% / <i>Max. Foreign Capital Investment 67%</i>
239.	Ketangkasan / Games of Skill	93293	Penanaman Modal Asing Maksimal 67% / <i>Max. Foreign Capital Investment 67%</i>
240.	Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi, dan Pameran / <i>Meetings, Incentive Tours, Conference and Exhibition Services (MICE)</i> (CPC 97909)	82301	a. Penanaman Modal Asing Maksimal 67% / <i>Max. Foreign Capital Investment 67%</i> b. Maksimal 70% bagi penanam modal dari Negara – Negara ASEAN / <i>Max. Investment 70% for Investors from ASEAN countries</i>
241.	SPA (<i>Sante Par Aqua</i>)	96122	Penanaman Modal Asing Maksimal 51% / <i>Max. Foreign Capital Investment 51%</i>
242.	Pengusahaan Obyek Wisata Alam di Luar Kawasan Konservasi / <i>Nature Tourist Object Businesses Outside Conservation Areas</i>	91034	Penanaman Modal Asing Maksimal 67% / <i>Max. Foreign Capital Investment 67%</i>

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

NO.	BIDANG USAHA <i>BUSINESS FIELD</i>	KBLI	PERSYARATAN <i>REQUIREMENTS</i>
243.	Pembuatan Sarana Promosi Film, Iklan, Poster, Still, Photo, Slide, Klise, Banner, Pamflet, Baliho, Folder, dll (CPC 871) / <i>Film Promotional Facilities for Advertisements, Posters, Stills, Photos, Slides, Negatives, Banners, Pamphlets, Giant Banners, Folders, etc.</i>	73100	a. Penanaman Modal Dalam Negeri 100% / <i>Domestic Capital Investment 100%</i> b. Maksimal 51% bagi penanam modal dari Negara – Negara ASEAN / <i>Max. Investment 51% for Investors from ASEAN countries</i>

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

J. Sektor Perhubungan / *Transportation Sector*

NO.	BIDANG USAHA <i>BUSINESS FIELD</i>	KBLI	SEKTOR <i>SECTOR</i>
244	Angkutan Barang Umum dengan Moda Darat / <i>Land-Based General Freight Transportation</i>	49431	Penanaman Modal Asing Maksimal 49% / <i>Max. Foreign Capital Investment 49%</i>
245	Angkutan Barang Khusus dengan Moda Darat / <i>Land-Based Special Freight Transportation</i>	49432	Penanaman Modal Asing Maksimal 49% / <i>Max. Foreign Capital Investment 49%</i>
246	Angkutan Orang dengan Moda Darat Dalam Trayek (Angkutan Antarkota, Antar Provinsi, Angkutan Pedesaan, Angkutan Antarkota Dalam Provinsi, Angkutan Perkotaan/Pedesaan, dan Angkutan Lintas Batas Negara) / <i>Land-Based Transportation for Passengers on Scheduled Routes (Intercity and Interprovincial Transportation, Suburban Transportation, In-province Intercity Transportation, Urban/Suburban Transportation, and Trans National Transportation)</i>	49211 49414 49213 49214 49215	Penanaman Modal Asing Maksimal 49% / <i>Max. Foreign Capital Investment 49%</i>
247	Angkutan Orang dengan Moda Darat Tidak Dalam Trayek (Taksi, Angkutan Pariwisata, Angkutan Tujuan Tertentu, Angkutan Kawasan Tertentu) / <i>Land-Based Transportation for Passengers Not on Scheduled Routes (Taxis, Tourism Transportation, Specific Destination Transportation, Specific Area Transportation)</i>	49421 49221	Penanaman Modal Asing Maksimal 49% / <i>Max. Foreign Capital Investment 49%</i>
248	Angkutan Moda Laut Dalam negeri / <i>Domestic Sea Transportation</i>	5011 5013	Penanaman Modal Asing Maksimal 49% / <i>Max. Foreign Capital Investment 49%</i>
249	Angkutan Moda Laut Luar Negeri / <i>International Sea Transportation</i>	5012 5014	Penanaman Modal Asing Maksimal 49% / <i>Max. Foreign Capital Investment 49%</i>
250	Angkutan Moda Laut Luat Negeri untuk Penumpang (tidak termasuk cabotage) (CPC 7211) / <i>International Sea Transportation for Passengers (Excluding Cabotage) (CPC 7211)</i>	50121 50122 50123	Maksimal 70% bagi penanam modal dari Negara – Negara ASEAN / <i>Max. Investment 70% for Investors from ASEAN countries</i>
251	Angkutan Moda Laut Luar Negeri untuk Barang (tidak termasuk cabotage) / <i>International Sea Transportation for Goods (Excluding Cabotage) (CPC 7212)</i>	50141 50142 50143	Maksimal 70% bagi penanam modal dari Negara – Negara ASEAN / <i>Max. Investment 70% for Investors from ASEAN countries</i>
252	Angkutan Penyebarangan Umum Antar Provinsi / <i>Interprovincial General Inland Water Transportation</i>	50214	Penanaman Modal Asing Maksimal 49% / <i>Max. Foreign Capital Investment 49%</i>
253	Angkutan Penyebarangan Perintis Antar Provinsi / <i>Interprovincial Pioneering Inland Water Transportation</i>	50215	Penanaman Modal Asing Maksimal 19% / <i>Max. Foreign Capital Investment 19%</i>

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

NO.	BIDANG USAHA <i>BUSINESS FIELD</i>	KBLI	SEKTOR <i>SECTOR</i>
254	Angkutan Penyeberangan Umum Antar Kabupaten/Kota / <i>Inter-District/Inter-City General Inland Water Transportation</i>	50216	Penanaman Modal Asing Maksimal 49% / <i>Max. Foreign Capital Investment 49%</i>
255	Angkutan Penyeberangan Umum Dalam Kabupaten/Kota / Inter-District / <i>Inter-City Pioneering Inland Water Transportation</i>	50217	Penanaman Modal Asing Maksimal 49% / <i>Max. Foreign Capital Investment 49%</i>
256	Angkutan Penyeberangan Umum Dalam Kabupaten/Kota / Intra-District / <i>Intra-City General Inland Water Transportation</i>	50218	Penanaman Modal Asing Maksimal 49% / <i>Max. Foreign Capital Investment 49%</i>
257	Angkutan Sungai dan Danau Untuk Penumpang dengan Trayek Tetap dan Teratur / <i>Intra-District/Intra-City General Inland Water Transportation</i>	50211	Penanaman Modal Asing Maksimal 49% / <i>Max. Foreign Capital Investment 49%</i>
258	Angkutan Sungai dan Danau dengan Trayek Tidak Tetap dan Tidak Teratur / <i>River and Lake Transportation for Passengers with Non-Fixed and Non-Scheduled Routes</i>	50212	Penanaman Modal Asing Maksimal 49% / <i>Max. Foreign Capital Investment 49%</i>
259	Angkutan Sungai dan Danau dengan Trayek Tidak Tetap dan Tidak Teratur dengan Wisata / <i>River and Lake Transportation for Tourism with Non-Fixed and Non-Scheduled Routes</i>	50213	Penanaman Modal Asing Maksimal 49% / <i>Max. Foreign Capital Investment 49%</i>
260	Angkutan Sungai dan Danau Untuk Barang Umum dan/atau Hewan / <i>River and Lake Transportation for General Freight and/or Animals</i>	50211	Penanaman Modal Asing Maksimal 49% / <i>Max. Foreign Capital Investment 49%</i>
261	Angkutan Sungai dan Danau Untuk Barang Khusus / <i>River and Lake Transportation for Special Freight</i>	50212	Penanaman Modal Asing Maksimal 49% / <i>Max. Foreign Capital Investment 49%</i>
262	Angkutan Sungai dan Danau untuk Barang Khusus / <i>River and Lake Transportation for Hazardous Freight</i>	50222	Penanaman Modal Asing Maksimal 49% / <i>Max. Foreign Capital Investment 49%</i>
263	Penyediaan Fasilitas Pelabuhan (dermaga, gedung, penundaan kapal terminal peti kemas, terminal curah cair, terminal curah kering dan terminal Ro-Ro) / <i>Provision of Port Facilities (Docks, Buildings, Tugs at Cargo Container Terminals, Liquid-Bulk Terminals, Dry-Bulk Terminals, and Roll on-Roll off (Ro-Ro) terminals)</i>	52221 52222 52223	a. Penanaman Modal Asing Maksimal 49% / <i>Max. Foreign Capital Investment 49%</i> b. Izin Khusus dari Kementerian Perhubungan terkait dengan persyaratan modal minimum / a <i>Special License from the Ministry of Transportation related to the Minimum Capital Requirement</i>
264	Penyediaan Fasilitas Pelabuhan Berupa Penampungan Limbah (reception facilities) / <i>Provision of Port Facilities in the form of Reception Facilities</i>	52109	Penanaman Modal Asing Maksimal 49% / <i>Max. Foreign Capital Investment 49%</i>
265	Jasa Salvage dan/atau Pekerjaan Bawah Air (PBA) / <i>Salvage and/or Underwater Work (PBA) Services</i>	52229	Izin Khusus dari Kementerian Perhubungan / <i>Special License from the Ministry of Transportation</i>
266	Usaha Penunjang pada Terminal / <i>Support Businesses in Terminals</i>	52211	Penanaman Modal Asing Maksimal 67% / <i>Max. Foreign Capital Investment 67%</i>
267	Jasa Kebandarudaraan / <i>Airport Services</i>	52230	Penanaman Modal Asing Maksimal 46% / <i>Max. Foreign Capital Investment 46%</i>
268	Jasa Penunjang Angkutan udara (sistem reservasi melalui computer, pelayanan di darat untuk penumpang dan kargo / ground handling dan penyewaan pesawat udara / aircraft leasing) / <i>Air-Transportation Support</i>	51102	Penanaman Modal Asing Maksimal 67% / <i>Max. Foreign Capital Investment 67%</i>

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

NO.	BIDANG USAHA <i>BUSINESS FIELD</i>	KBLI	SEKTOR <i>SECTOR</i>
	<i>Services (Computer Reservation Systems, ground handling for passengers and cargo and aircraft leasing)</i>		
269	Pelayanan Jasa Terkait Bandar Udara / <i>Airport-Related Services</i>	52230	Penanaman Modal Asing Maksimal 67% / <i>Max. Foreign Capital Investment 67%</i>
270	Jasa Bongkar muat Barang (maritime cargo handling services dengan CPC 7412) / <i>Loading and Unloading Goods (Marine Cargo Handling Services with CPC 7412)</i>	52240	a. Penanaman Modal Asing Maksimal 67% / <i>Max. Foreign Capital Investment 67%</i> b. Maksimal 70% bagi penanam modal dari negara – negara ASEAN / <i>Max. Investment 70% for Investors from ASEAN countries</i> c. Hanya berlaku pada 4 (empat) pelabuhan di wilayah Indonesia bagian timur yaitu: Pelabuhan Bitung, Pelabuhan Ambon, Pelabuhan Kupang, dan Pelabuhan Sorong khusus Negara – negara anggota ASEAN / <i>Only valid for 4 (four) ports in the east of Indonesia namely: Bitung, Ambon, Kupang, and Sorong Ports, specifically for ASEAN countries</i>
271	Jasa Pengurusan Transportasi / <i>Freight Forwarding Services</i>	52291	Penanaman Modal Asing Maksimal 67% / <i>Max. Foreign Capital Investment 67%</i>
272	Jasa Ekspedisi Muatan Pesawat Udara / <i>Air Expedition Freight Forwarding Services</i>	52294	Penanaman Modal Asing Maksimal 67% / <i>Max. Foreign Capital Investment 67%</i>
273	Agen Penjualan Umum (GSA) Perusahaan Angkutan Udara Asing / <i>General Sales Agent (GSA) for Foreign Air Transportation Companies</i>	79112	Penanaman Modal Asing Maksimal 67% / <i>Max. Foreign Capital Investment 67%</i>
274	Penyediaan dan Pengusahaan Pelabuhan Penyeberangan / <i>Harbor Crossing Provisions and Businesses</i>	52223	Penanaman Modal Asing Maksimal 49% / <i>Max. Foreign Capital Investment 49%</i>
275	Penyediaan dan Pengusahaan Pelabuhan Sungai dan Danau / <i>River and Lake Harbor Provisions and Businesses</i>	52222	Penanaman Modal Asing Maksimal 49% / <i>Max. Foreign Capital Investment 49%</i>
276	Pelayaran Rakyat / <i>Small-scale Shipping</i>	50135	Modal dalam negeri 100% / <i>Domestic Capital Investment 100%</i>
277	Angkutan Moda Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri / <i>Domestic Scheduled Commercial Air Transportation</i>	51101 51102	a. Penanaman Modal Asing Maksimal 49% / <i>Max. Foreign Capital Investment 49%</i> b. Pemilik modal nasional harus tetap lebih besar dari keseluruhan pemilik modal asing (<i>single majority</i>) / <i>The national investor capital ownership must be higher than the total foreign investor capital ownership (single majority)</i>
278	Angkutan Moda Udara Niaga Berjadwal Luar Negeri / <i>International Scheduled Commercial Air Transportation</i>	51101 51102 51103	a. Penanaman Modal Asing Maksimal 49% / <i>Max. Foreign Capital Investment 49%</i> b. Pemilik modal nasional harus tetap lebih besar dari keseluruhan pemilik modal asing (<i>single majority</i>) / <i>The national investor capital ownership must be higher than the total foreign investor capital ownership (single majority)</i>

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

NO.	BIDANG USAHA <i>BUSINESS FIELD</i>	KBLI	SEKTOR <i>SECTOR</i>
279	Angkutan Udara Niaga Tidak Berjadwal / <i>Non-Scheduled Commercial Air Transportation</i>	51104 51105	a. Penanaman Modal Asing Maksimal 49% / <i>Max. Foreign Capital Investment 49%</i> b. Pemilik modal nasional harus tetap lebih besar dari keseluruhan pemilik modal asing (<i>single majority</i>) / <i>the National investor capital ownership must be higher than the total foreign investor capital ownership (single majority)</i>
280	Angkutan Udara Bukan Niaga / <i>Non-Commercial Air Transportation</i>	51109	a. Penanaman Modal Asing Maksimal 49% / <i>Max. Foreign Capital Investment 49%</i> b. Pemilik modal nasional harus tetap lebih besar dari keseluruhan pemilik modal asing (<i>single majority</i>) / <i>The national investor capital ownership must be higher than the total foreign investor capital ownership (single majority)</i>
281	Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor / <i>Organizing regular Motorcycle Testing</i>	71203	Penanaman Modal Asing Maksimal 49% / <i>Max. Foreign Capital Investment 49%</i>
282	Pembangunan Terminal Penumpang Angkutan Darat (terbatas hanya fasilitas umum dan terminal barang untuk umum) / <i>Construction of Land-Based Passenger Terminals (limited to public facilities and public cargo terminals)</i>	52211	Penanaman Modal Asing Maksimal 49% / <i>Max. Foreign Capital Investment 49%</i>
283	Angkutan Multimoda / <i>Multimode Transportation</i>	52295	Penanaman Modal Asing Maksimal 49% / <i>Max. Foreign Capital Investment 49%</i>

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

K. Sektor Komunikasi dan Informatika / *Communication and Informatics Sector*

NO.	BIDANG USAHA <i>BUSINESS FIELD</i>	KBLI	SEKTOR <i>SECTOR</i>
284	Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi Tetap / <i>Fixed Telecommunications Network Services</i>	61100	Penanaman Modal Asing Maksimal 67% / <i>Max. Foreign Capital Investment 67%</i>
285	Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi Bergerak / <i>Mobile Telecommunications Network Services</i>	61200 61300	Penanaman Modal Asing Maksimal 67% / <i>Max. Foreign Capital Investment 67%</i>
286	Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi yang Terintegrasi dengan Jasa Telekomunikasi / <i>Telecommunications Network Services Integrated with Telecommunications Services</i>	61921 61922 61923 61929	Penanaman Modal Asing Maksimal 67% / <i>Max. Foreign Capital Investment 67%</i>
287	Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi Layanan Content (ring tone, sms premium, dsb) / <i>Content Telecommunications Network Services (ring tones, premium text messages, etc.)</i>	61911	Penanaman Modal Asing Maksimal 67% / <i>Max. Foreign Capital Investment 67%</i>
288	Pusat Layanan Informasi (call center) dan Jasa Nilai Tambah Teleponi Lainnya / <i>Call Center and Other Telephone Value Added Services</i>	61919	Penanaman Modal Asing Maksimal 67% / <i>Max. Foreign Capital Investment 67%</i>
289	Jasa Akses Internet / <i>Internet Access Services</i>	61921	Penanaman Modal Asing Maksimal 67% / <i>Max. Foreign Capital Investment 67%</i>
290	Jasa Sistem Komunikasi Data / <i>Data communication systems services</i>	61922	Penanaman Modal Asing Maksimal 67% / <i>Max. Foreign Capital Investment 67%</i>
291	Jasa Internet Teleponi Untuk Keperluan Publik / <i>Telephone internet services for the needs of the public</i>	61923	Penanaman Modal Asing Maksimal 67% / <i>Max. Foreign Capital Investment 67%</i>
292	Jasa Interkoneksi Internet (NAP), Jasa Multimedia Lainnya / <i>Internet interconnection services (NAP), other multimedia services</i>	61929	Penanaman Modal Asing Maksimal 67% / <i>Max. Foreign Capital Investment 67%</i>
293	Lembaga Penyiaran Publik (LPP): Radio / <i>Public Broadcasting Agencies (LPP): Radio</i>	60101	Hanya monopoli untuk Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (RRI), Televisi Republik Indonesia (TVRI), dan Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL) / <i>A Monopoly reserved for the Public Broadcasting Agency of Radio Republik Indonesia (RRI), Televisi Republik Indonesia (TVRI), and Local Public Broadcasting Institutions (LPPL)</i>
294	Lembaga Penyiaran Publik (LPP): Televisi / <i>Public Broadcasting Agencies (LPP): Television</i>	60201	
295	Penyedia, Pengelola (Pengoperasian dan Penyewaan) dan Penyedia Jasa Konstruksi untuk Menara Telekomunikasi / <i>Telecommunication Tower Construction services Providers, Managers (Operation and Rental) and Service Providers</i>	42217	Modal dalam negeri 100% / <i>100% local Capital Investment</i>

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

NO.	BIDANG USAHA <i>BUSINESS FIELD</i>	KBLI	SEKTOR <i>SECTOR</i>
296	Penerbitan Surat Kabar, Majalah dan Buletin (pers) / <i>Publication of newspapers, magazines, and bulletins (press)</i>	58130	Modal dalam negeri 100% / <i>100% Local Capital Investment</i>
297	Lembaga Penyiaran Swasta (LPS) / <i>Broadcasting Agencies: Private Broadcasting Agencies (LPS)</i>	60102	a. Hanya untuk penambahan dan pengembangan usaha / <i>Only for additions to and the development of the business</i>
298	Lembaga Penyiaran Berlangganan (LPB) / <i>Broadcasting Agencies: Subscription based Broadcasting Agencies (LPB)</i>	60202	b. Penanaman Modal Asing Maksimal 20% / <i>Maximum Foreign Capital Investment 20%</i>
299	Penyelenggaraan Pos / <i>Mail providers</i>	53101 53102 53202	Penanaman Modal Asing Maksimal 49% / <i>Max. Foreign Capital Investment 49%</i>
300	Penyelenggara Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (market place berbasis platform, daily deals, price grabber, iklan baris online) dengan Nilai Investasi kurang dari Rp. 100.000.000.000,00 / <i>Organizers of Trading through Electronic Systems (platform based marketplace, daily deals, price grabber, online classified advertisements) with an Investment Value of less than Rp. 100,000,000,000</i>	00000	Penanaman Modal Asing Maksimal 49% / <i>Max. Foreign Capital Investment 49%</i>

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

L. Sektor Keuangan / *Financial Sector*

NO.	BIDANG USAHA <i>BUSINESS FIELD</i>	KBLI	SEKTOR <i>SECTOR</i>
301	Perusahaan Pembiayaan Investasi / <i>Investment Finance Companies</i>	64929 64910	Penanaman Modal Asing Maksimal 85% / <i>Max. Foreign Capital Investment 85%</i>
302	Perusahaan Pembiayaan Modal Kerja / <i>Working Capital Finance Companies</i>	54992	Penanaman Modal Asing Maksimal 85% / <i>Max. Foreign Capital Investment 85%</i>
303	Perusahaan Pembiayaan Multiguna / <i>Multi-purpose Finance Companies</i>	64922 64923	Penanaman Modal Asing Maksimal 85% / <i>Max. Foreign Capital Investment 85%</i>
304	Modal Ventura / <i>Venture Capital</i>	64991	Penanaman Modal Asing Maksimal 85% / <i>Max. Foreign Capital Investment 85%</i>
305	Perusahaan Asuransi Kerugian / <i>Loss Insurance Companies</i>	64991	Penanaman Modal Asing Maksimal 80% / <i>Max. Foreign Capital Investment 80%</i>
306	Perusahaan Asuransi Jiwa / <i>Life Insurance Companies</i>	65111 65112	Penanaman Modal Asing Maksimal 80% / <i>Max. Foreign Capital Investment 80%</i>
307	Perusahaan Reasuransi / <i>Reinsurance Companies</i>	65121 65122	Penanaman Modal Asing Maksimal 80% / <i>Max. Foreign Capital Investment 80%</i>
308	Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi / <i>Insurance Loss Appraisal Companies</i>	66210	Penanaman Modal Asing Maksimal 80% / <i>Max. Foreign Capital Investment 80%</i>
309	Perusahaan Agen Asuransi / <i>Insurance Agent Companies</i>	66221	Penanaman Modal Asing Maksimal 80% / <i>Max. Foreign Capital Investment 80%</i>
310	Perusahaan Pialang Asuransi / <i>Insurance Brokerage Companies</i>	66222	Penanaman Modal Asing Maksimal 80% / <i>Max. Foreign Capital Investment 80%</i>
311	Perusahaan Pialang Reasuransi / <i>Reinsurance Brokerage Companies</i>	66225	Penanaman Modal Asing Maksimal 80% / <i>Max. Foreign Capital Investment 80%</i>
312	Perusahaan Konsultan Aktuaria / <i>Actuarial Consultancy Companies</i>	66291	Penanaman Modal Asing Maksimal 80% / <i>Max. Foreign Capital Investment 80%</i>
313	Perusahaan Penjaminan / <i>Guarantee Companies</i>	64993	Penanaman Modal Asing Maksimal 80% / <i>Max. Foreign Capital Investment 80%</i>

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

NO.	BIDANG USAHA <i>BUSINESS FIELD</i>	KBLI	SEKTOR <i>SECTOR</i>
314	Pedagang Valuta Asing Non-Bank / <i>Non-Bank Foreign Exchange Traders</i>	66197	Modal dalam negeri 100% / <i>Max. Foreign Capital Investment 100%</i>
315	Perusahaan Pialang Pasar Uang / <i>Money Market Brokerage Companies</i>	64190	Perizinan Khusus dari Otoritas Jasa Keuangan / <i>Special Permit from the Financial Services Authority</i>

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

M. Sektor Perbankan / *Banking Sector*

NO.	BIDANG USAHA <i>BUSINESS FIELD</i>	KBLI	SEKTOR <i>SECTOR</i>
316	Bank Konvensional / <i>Conventional Banks</i>	64125 64126	Perizinan Khusus dari Otoritas Jasa Keuangan / A <i>Special Permit from the Financial Services Authority</i>
317	Bank Syariah / <i>Sharia Banks</i>	64131	Perizinan Khusus dari Otoritas Jasa Keuangan / A <i>Special Permit from the Financial Services Authority</i>
318	Bank Perkreditan Rakyat Konvensional / <i>Rural Banks</i>	64127	Modal dalam negeri 100% / <i>100% Local Capital Investment</i>
319	Bank Perkreditan Rakyat Syariah / <i>Sharia Rural Banks</i>	64133	Modal dalam negeri 100% / <i>100% Local Capital Investment</i>

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

N. Sektor Ketenagakerjaan / Manpower Sector

NO.	BIDANG USAHA <i>BUSINESS FIELD</i>	KBLI	SEKTOR <i>SECTOR</i>
320	Jasa Penempatan Tenaga Kerja Indonesia di Dalam Negeri (seperti pendaftaran, perekrutan, pengurusan dokumen, penampungan orientasi pra pemberangkatan, pemberangkatan, penempatan dan pemulangan tenaga kerja) / <i>Domestic (in-country) Indonesian Manpower Placement Services (such as registration, recruitment, document handling, shelter for pre-departure orientation, send-off, placement and manpower repatriation services)</i>	78101	Penanaman Modal Asing Maksimal 49% / <i>Maximum 49% Foreign Capital Investment</i>
321	Penyediaan Jasa Pekerja / Buruh (proses pendaftaran, perekrutan, pengurusan dokumen (antara lain perjanjian kerja), negosiasi untuk mendapatkan pekerjaan dari perusahaan pemberi kerja, mempekerjakan pekerja/buruh, seperti pekerjaan jasa <i>cleaning service</i> , satpam, catering dan jasa penunjang lainnya) / <i>Providers of Worker/Laborer Services (registration, recruitment, document handling (among others employment agreements), negotiation to obtain work from employers, worker/laborer employment, such as for cleaning services, security, catering and other support services)</i>	78200	Penanaman Modal Asing Maksimal 49% / <i>Maximum 49% Foreign Capital Investment</i>
322	Pelatihan Kerja (memberi, memperoleh, meningkatkan, mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap dan etos kerja antara lain meliputi bidang kejuruan teknik dan <i>engineering</i> , tata niaga, bahasa, pariwisata, manajemen, teknologi informasi, seni dan pertanian yang diarahkan untuk membekali angkatan kerja memasuki dunia kerja) / <i>Work Training (to provide, obtain, enhance, develop professional competence, productivity, discipline, attitudes and work ethics, including among others in the areas of technical and engineering vocational training, business administration, language, tourism, management, information technology, art and agriculture in order to equip workers entering the work force)</i>	85499 85492 85493 85494	Penanaman Modal Asing Maksimal 67% / <i>Maximum 67% Foreign Capital Investment</i>
323	Jasa Penempatan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (proses perekrutan, pengurusan dokumen, pendidikan dan pelatihan, penampungan, persiapan pemberangkatan, pemberangkatan dan pemulangan Calon Tenaga Kerja Indonesia / CTKI) / <i>Overseas Indonesian Manpower Placement Services (recruitment, document handling, education and training, shelter, pre-departure preparation, departure and repatriation of Candidate Indonesian Manpower/CTKI)</i>	78102	Modal dalam negeri 100% / <i>100% Local Capital Investment</i>

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

O. Sektor Pendidikan / Education Sector

NO.	BIDANG USAHA <i>BUSINESS FIELD</i>	KBLI	SEKTOR <i>SECTOR</i>
324	Pendidikan Anak Usia Dini / <i>Early Age Child Education</i>	85132 85133	Sesuai Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) serta Peraturan Pelaksanaannya / <i>In accordance with Law Number 20 of 2003 on The National Educational System and its Implementing Regulations</i> <i>Maximum 49% Foreign Capital Investment</i> <i>Maximum 67% Foreign Capital Investment</i>
325	Jasa Pendidikan Sekolah Dasar Swasta / <i>Private Elementary School Education Services</i>	85121	
326	Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Swasta / <i>Private Junior High School Education</i>	85122	
327	Jasa Pendidikan Sekolah Menengah Umum Swasta / <i>Private Senior High School Education Services</i>	85220	
328	Jasa Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan Swasta / <i>Private Vocational Senior High School Education Services</i>	85240	
329	Jasa Pendidikan Tinggi Program Gelar Swasta / <i>Private Higher Degree Program Education Services</i>	85321	Sesuai Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi serta Peraturan Pelaksanaannya / <i>In accordance with Law Number 12 of 2012 on Higher Education and its Implementing Regulations</i>
330	Jasa Pendidikan tinggi NonGelar Swasta / <i>Private Higher Non-Degree Program Education Services</i>	85322	

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

P. Sektor Kesehatan / Health Sector

NO.	BIDANG USAHA <i>BUSINESS FIELD</i>	KBLI	SEKTOR <i>SECTOR</i>
331	Industri Farmasi Obat Jadi / <i>Patent Medicine Industries</i>	21012	Penanaman Modal Asing Maksimal 85% / <i>Maximum 85% Foreign Capital Investment</i>
332	Institusi Pengujian Alat Kesehatan / <i>Health Equipment Testing Institutions</i>	71205	Penanaman Modal Asing Maksimal 67% / <i>Maximum 67% Foreign Capital Investment</i>
333	Fasilitas Pelayanan Akupuntur / <i>Acupuncture Services Facilities</i>	86901	Penanaman Modal Asing Maksimal 49% / <i>Maximum 49% Foreign Capital Investment</i>
334	Pelayanan Pest Control / Fumigasi / <i>Pest Control/Fumigation Services</i>	86903	Penanaman Modal Asing Maksimal 67% / <i>Maximum 67% Foreign Capital Investment</i>
335	Pelayanan Evakuasi Medik dan Ambulatory / <i>Medical Evacuation and Ambulance Services</i>	86904	Penanaman Modal Asing Maksimal 67% / <i>Maximum 67% Foreign Capital Investment</i>
336	Produsen Narkotika (Industri Farmasi) / <i>Narcotic Producers (Pharmaceutical Industry)</i>	21012	Izin Khusus dari Kementerian Kesehatan / A <i>Special Permit from the Ministry of Health</i>
337	Pedagang Besar Farmasi Narkotika / <i>Narcotic Pharmaceuticals Wholesalers</i>	46693	Izin Khusus dari Kementerian Kesehatan / A <i>Special Permit from the Ministry of Health</i>
338	Pengolahan Obat Tradisional / <i>Traditional Medicine Processing</i>	21022	Modal dalam negeri 100% / <i>100% Domestic Capital Ownership</i>
339	Industri/Usaha Obat Tradisional/Ekstrak Bahan Alam / <i>Traditional/Natural Extract Medicine Industries/Services</i>	21022	Modal dalam negeri 100% / <i>100% Domestic Capital Ownership</i>
340	Perdagangan Besar Bahan Baku Farmasi / <i>Pharmaceutical Materials Wholesale Businesses</i>	46693	Modal dalam negeri 100% / <i>100% Domestic Capital Ownership</i>
341	Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optik / <i>Pharmacies, Drug Stores, Medical Instrument Stores, and Optical Device Stores</i>	47722 47723 47733	Modal dalam negeri 100% / <i>100% Domestic Capital Ownership</i>

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

NO.	BIDANG USAHA <i>BUSINESS FIELD</i>	KBLI	SEKTOR <i>SECTOR</i>
342	Klinik Pratama / <i>Basic Medical Clinics</i> ; Rumah Bersalin Swasta / <i>Private Midwife Clinic</i> ; Klinik Pengobatan Umum / <i>General Medical Services Clinic</i> ; Jasa Kesehatan Pemukiman / <i>Residential Health Services</i> ; dan Sarana Pelayanan Kesehatan Dasar / <i>and Primary Health Care Facilities</i> .	86103 86104 86109	Modal dalam negeri 100% / <i>100% Domestic Capital Ownership</i>
343	Rumah Sakit / <i>Hospitals</i>	86103	a. Penanaman Modal Asing Maksimal 67% / <i>Maximum 67% Foreign Capital Investment</i> b. Maksimal 70% bagi penanam modal dari negara – negara ASEAN; dan / <i>Maximum 70% for investors from ASEAN countries; and</i> c. Dapat dilakukan diseluruh Ibukota Provinsi Indonesia Timur kecuali Makassar dan Manado / <i>Allowed in all capital cities in East Indonesia Provinces, except in Makassar and Manado</i>
344	Klinik Utama; Klinik Kedokteran Spesialis (Clinic Specialised Medical Services) (CPC 9312), Klinik Kedokteran Gigi Spesialis (CPC 9312), Jasa Keperawatan Spesialis (Nursing Services dengan CPC 93191), dan Jasa Rumah Sakit Lainnya (klinik rehabilitasi medic) / <i>Main Clinic: Clinic Specialising in Medical Services (CPC 9312), Dental Clinics (CPC 9312), Nursing Services (CPC 93191), and other Hospital Services (medical rehabilitation clinics)</i>	86109 86202 86203 86901	a. Penanaman Modal Asing Maksimal 67% / <i>Maximum of 67% Foreign Capital Investment</i> b. Maksimal 70% bagi penanam modal dari negara – negara ASEAN; dan / <i>Maximum 70% for investors from ASEAN countries; and</i> c. Dapat dilakukan diseluruh Ibukota Provinsi Indonesia Timur kecuali Makassar dan Manado / <i>Allowed in all capital cities in East Indonesia Provinces, except in Makassar and Manado</i>
345	Penyalur Alat Kesehatan / <i>Medical Instrument Distributors</i>	46693	a. Penanaman Modal Asing Maksimal 49% / <i>Maximum 49% Foreign Capital Investment</i> b. Izin Khusus dari Kementerian Kesehatan / <i>A Special Permit from the Ministry of Health</i>
346	Industri Alat Kesehatan; Kelas A (Kapas, pembalut, kasa, tongkat, tiang infus, pembalut wanita, popok dewasa, tempat tidur pasien, kursi roda) / <i>Medical Instrument Industries: Class A (Cotton, bandages, gauze, stands, IV stands, sanitary napkins, adult diapers, patient beds, wheelchairs)</i>	21012	a. Penanaman Modal Asing Maksimal 33% / <i>Maximum 33% Foreign Capital Investment</i> b. Izin Khusus dari Kementerian Kesehatan / <i>A Special Permit from the Ministry of Health</i>
347	Industri Alat Kesehatan: Kelas B (Masker bedah, jarum suntik, pasien monitor, kondom, <i>surgical gloves</i> , cairan hemodialisa, PACS, <i>surgical knives</i>) / <i>Medical Instrument Industries: Class B (Surgical masks, syringes, patient monitors, condoms, surgical gloves, hemodialysis fluids, PACS, surgical scalpels)</i>	21012	Izin Khusus dari Kementerian Kesehatan / <i>A Special Permit from the Ministry of Health</i>
348	Industri Alat Kesehatan: Kelas C (IV Catheter, X Ray, ECG, Patient Monitor, Inplan Orthopedy, Contact Lens, Oxymeter, Densitometer) / <i>Medical Instrument Industries: Class C (IV Catheters, X-Ray, ECGs, Patient Monitors, Orthopedic Implants, Contact Lenses, Oxymeters, Density meters)</i>	21012	Izin Khusus dari Kementerian Kesehatan / <i>A Special Permit from the Ministry of Health</i>

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

NO.	BIDANG USAHA <i>BUSINESS FIELD</i>	KBLI	SEKTOR <i>SECTOR</i>
349	Kelas D (CTScan, MRI, Catheter Jantung, Stent Jantung, HIV Test, Pacemaker, Dormal Filler, Ablation Catheter / <i>Medical Instrument Industries: Class D (CT Scanners, MRI, Cardiac Catheters, Cardiovascular Stents, HIV Tests, Pacemakers, Doormal Fillers, Ablation Catheters)</i>)	21012	Izin Khusus dari Kementerian Kesehatan / <i>A Special Permit from the Ministry of Health</i>
350	Bank dan Laboratorium Jaringan dan Sel / <i>Tissue and Cell Banks and Laboratories</i>	86903	Izin Khusus dari Kementerian Kesehatan / <i>A Special Permit from the Ministry of Health</i>

Catatan:

Dalam hal Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) meliputi lebih dari satu bidang usaha, maka persyaratan sebagaimana termaksud dalam Lampiran III hanya berlaku bagi Bidang Usaha yang tercantum dalam kolom Bidang Usaha tersebut

Note:

If the Standard Indonesian Business Field Classifications (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia/KBLI) include more than one business field, the requirements referred to in Annex III only apply to the Business Fields stated in the column of the relevant Business Field.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

Ttd./ *signed*

Joko Widodo

Salinan Sesuai dengan aslinya
A copy the same as the original

SEKRETARIAT KABINET RI
THE CABINET SECRETARIAT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
Deputi Bidang Perekonomian
Deputy for the Economic Sector

Ttd / *signed*

Agustina Murbaningsih